



BAB 8



Kampanye untuk Hak Nonmanusia dan Status Kera dalam Kurungan

Pendahuluan

Bab ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian I membahas tentang perjuangan agar hewan nonmanusia memperoleh 'kepribadian hukum' (*personhood*) dan hak bagi hewan selain manusia (nonmanusia). Sementara Bagian II menyajikan informasi terbaru yang lebih luas mengenai statistik kera dalam kurungan yang tercakup dalam setiap volume *Negara Kera*.

Dua milenium yang lalu, peraturan Romawi membagi status hukum menjadi dua kategori utama, yaitu 'orang' dan 'benda'. Saat ini, dipahami bahwa 'orang' memiliki kapasitas untuk melakukan hak ataupun kewajiban hukum. Orang memiliki nilai yang melekat dan dapat dilihat oleh hakim sipil. Orang 'memiliki arti' dalam sistem hukum. Sebaliknya, 'benda' tidak memiliki kapasitas melakukan hak dan kewajiban hukum. Nilai benda bergantung pada apa

“NhRP memengaruhi pemahaman tentang ‘kepribadian’ melalui kampanye litigasi strategis jangka panjang yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama, yang berupaya mendapatkan pengakuan atas kemampuan berpikir simpanse yang kompleks dan kemandiriannya.”

yang diberikan oleh orang padanya. Benda tidak dilihat oleh hakim sipil dan tidak pula ‘dianggap.’ Dalam hal ini, kedudukan antara orang dan benda saling berkebalikan, dipisahkan oleh dinding besar yang tak terlihat (*Byrn v. NYCHHC*, 1972, hal. 201; Trahan, 2008).

Dikotomisasi antara benda dan orang ini mencerminkan perbedaan antara kesejahteraan dan hak, karena kedua hal tersebut saat ini berlaku bagi hewan nonmanusia.¹ Aturan yang mengatur kesejahteraan menetapkan bagaimana cara manusia *seharusnya* memperlakukan hewan lain. Namun jika manusia gagal mematuhi aturan ini, maka hewan nonmanusia pun menjadi tidak terlindungi secara perdata. Walaupun tidak terlalu kuat, kesejahteraan menjadi hal yang penting jika dikombinasikan dengan hak. Hak berfokus pada bagaimana cara manusia *seharusnya* memperlakukan hewan lain sekaligus memberikan ganti rugi secara perdata kepada hewan nonmanusia jika manusia melanggar hukum (Wise, 2017b).

Nonhuman Rights Project (NhRP) yang berbasis di Florida melakukan perjuangan guna memperoleh hak legal fundamental bagi hewan nonmanusia dalam konteks perjuangan yang lebih luas untuk mencapai keadilan sosial. Secara spesifik, NhRP menggunakan strategi hukum yang dijadikan model pada perjuangan sebelumnya dan yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, yaitu strategi hukum yang dilakukan para abolisionis (penentang perbudakan) di abad ke-18 dan 19; yang dilakukan pada Perlindungan Hukum dan Biaya Edukasi National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) yang memulai perjuangan di beberapa negara bagian demi memperoleh kesetaraan hak bagi orang Afro-Amerika pada tahun 1940; dan yang dilakukan oleh pendukung perkawinan sesama jenis pada abad 21 (Cole, 2016, hal. 17–93; Greenberg, 2004, hal. xi, 5; Wise, 2005).

Di Amerika Serikat, NhRP berjuang untuk hak asasi kera besar dalam kurungan berdasarkan sistem hukum *common law*. Sementara di sejumlah negara lain, perjuangan yang serupa berlangsung dalam sistem hukum *civil law*. Bagian ini membahas strategi hukum yang berlaku saat ini sekaligus menyajikan informasi rinci mengenai kasus indi-

vidu kera, termasuk Sandra, satu individu orangutan di Kebun Binatang Palermo di Buenos Aires, Argentina; Cecilia, satu individu simpanse di Kebun Binatang Mendoza di Argentina; Hiasl, simpanse liar tangkapan di Austria; dan Suica, simpanse di Kebun Binatang Salvador di Bahia, Brazil. Bagian ini selanjutnya membahas gagasan mengenai hak pada tingkat taksonomi. Temuan kunci yang diperoleh adalah sebagai berikut.

- Di Amerika Serikat, NhRP memengaruhi pemahaman tentang ‘kepribadian’ melalui kampanye litigasi strategis jangka panjang yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama, yang berupaya mendapatkan pengakuan atas kemampuan berpikir simpanse yang kompleks dan kemandiriannya.
- NhRP berasumsi bahwa hakim yang adil, yang selalu terpapar bukti ahli yang meyakinkan tentang kemandirian simpanse, yang dilengkapi argumentasi hukum kuat yang berasal dari nilai dan prinsip yang secara rutin digunakan oleh hakim, pada akhirnya akan memutuskan bahwa hewan nonmanusia patut mendapatkan hak asasi yang melindungi kepentingan dasarnya.
- NhRP memperluas kampanyenya dengan tidak hanya mencakup simpanse, tetapi juga gajah, dan melakukan peninjauan lebih lanjut di Amerika Serikat (yang sebelumnya belum pernah dilakukan) tentang hak hewan nonmanusia tidak hanya pada spesies-spesies yang paling erat hubungannya dengan manusia.
- Dalam beberapa kewenangan hukum *civil law*, pertimbangan mengenai ‘kepribadian’ bagi kera besar membuahkan pengakuan yang lebih tegas atas hak asasi kera besar, yang menunjukkan pentingnya pelaksanaan kampanye hukum.

Bagian II memberikan informasi terbaru mengenai statistik populasi kera yang berada dalam kurungan serta membahas lanskap peraturan yang berdampak pada hewan-hewan tersebut. Berikut adalah temuan kunci yang diperoleh.

- Informasi rinci mengenai jumlah, asal, dan status kesejahteraan kera dalam kurungan hanya tersedia dari beberapa

kondisi perawatan/pemeliharaan kera dan kualitas datanya sangat bervariasi.

- Data yang tersedia menunjukkan bahwa jumlah kera yang dikurung di kebun binatang relatif statis, meskipun terdapat pengecualian-kecualian tertentu.
- Ukuran suaka yang tidak memadai bagi kera hasil sitaan dan yang dilepas secara sukarela merupakan rintangan utama dalam penegakan dan kepatuhan hukum di berbagai negara.
- Di negara-negara habitat kera, pusat penyelamatan dan suaka menerima kera dalam kondisi yang sangat tidak lestari, yang menunjukkan perlunya melakukan upaya mendesak untuk mengatasi pembunuhan dan penangkapan kera serta perdagangan kera hidup.

Perjuangan untuk Mendapatkan Hak Legal bagi Hewan Nonmanusia

Latar Belakang

Saat ini, berdasarkan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, setiap manusia di Bumi dianggap sebagai 'orang' (PBB, 1948, Pasal 6; PBB, 1966, Pasal 16).² Akan tetapi anggapan tersebut tidak selalu tepat. Edith Hamilton, yang dapat disebut ahli klasikisme terkemuka pada pertengahan abad ke-20, mengingatkan tentang titik balik penting yang pertama dalam perjuangan selama dua milenium untuk menghapus perbudakan. Ia menjelaskan tentang perbudakan di Yunani kuno sebagai berikut.

Saat melihat pencapaian bangsa Yunani, yang perlu diingat adalah bahwa mereka merupakan bangsa pertama yang mempelajari tentang perbudakan. Perlakuan perbudakan ini dianggap harus dikutuk hingga kemudian pada akhir abad kedua sebelum Masehi, yakni dua ribu tahun sebelum terjadinya Perang Saudara di Amerika Serikat, mazhab besar filsafat Stoik (mazhab filsafat Yunani yang luas penyebarannya) menyatakannya sebagai suatu kesalahan yang tidak dapat ditolerir (Hamilton, 1964, hal. 24).

Dahulu kala, jutaan manusia (termasuk budak, perempuan, anak-anak, bangsa Yahudi, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas) diperlakukan layaknya benda. Upaya hak sipil selama beberapa abad lampau dengan lambat telah mengubah anggapan terhadap manusia sebagai 'benda' untuk kemudian dianggap sebagai 'orang'. "Pemanusiaan" (penetapan kesamaan setiap pribadi di mata hukum) bagi setiap manusia akhirnya menjadi model yang digunakan untuk pekerjaan Nonhuman Rights Project (NhRP, tanpa tahun-e). Saat ini, setiap manusia merupakan perorangan secara hukum, sedangkan hewan nonmanusia umumnya tetap dianggap sebagai benda. Untuk alasan ini, umumnya masyarakat, termasuk hakim, keliru meyakini bahwa terdapat dinding tak terlihat yang memisahkan manusia dengan hewan, seperti pada pemisahan manusia dengan benda).

Pengesahan Undang-Undang Perdagangan Budak tahun 1807 dan Undang-Undang Penghapusan Perbudakan tahun 1833 di Inggris menandakan adanya kecaman terhadap bentuk perbudakan yang bertumpu pada 'kualitas kebendaan' manusia tertentu (Parlemen Inggris, 1807, 1833). Bagian pertama undang-undang ini disusun berdasarkan putusan yang menjadi tonggak capaian perubahan, yakni pada kasus *Somerset* yang terkenal, yang diputuskan 35 tahun sebelumnya oleh Lord Mansfield, yang pada dasarnya berupaya menghapus perbudakan di Inggris (*Somerset v. Stewart*, 1772). Perjuangan formal antiperbudakan yang sesungguhnya berakhir tahun 1957 dengan berlakunya Konvensi Pelengkap tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, serta Lembaga dan Praktik yang Menyerupai Perbudakan, yang melengkapi Konvensi Perbudakan Liga Bangsa-Bangsa tahun 1926 (Liga Bangsa-Bangsa, 1926; PBB, 1956).

Pada tahun 1976, Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik diberlakukan (PB, 1966). Pasal 16 dalam Perjanjian tersebut menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana saja ia berada". Hal ini memperkuat Pasal 6 Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan

“Informasi rinci mengenai jumlah, asal, dan status kesejahteraan kera dalam kurungan hanya tersedia dari beberapa kondisi perawatan/pemeliharaan kera dan kualitas datanya sangat bervariasi.”

Foto: Penelitian ekstensif selama puluhan tahun terhadap kemampuan berpikir simpanse yang sangat kompleks telah mengungkapkan bahwa simpanse memiliki kemandirian dan serupa dengan manusia, dan oleh karenanya lebih dapat dimengerti oleh manusia. © Slobodan Randjelovic/ Arcus Foundation

di depan hukum sebagai pribadi di mana pun ia berada” (PBB, 1948).

Akan tetapi manusia bukanlah satu-satunya pribadi. Berbagai macam makhluk hidup non-manusia telah lama dianggap sebagai pribadi di negara-negara yang menggunakan sistem hukum *common law*, yang banyak di antaranya merupakan negara berbahasa Inggris (*The Economist*, 2013). Contoh yang paling banyak diketahui adalah perusahaan, kapal besar, dan negara bagian, meskipun bukan itu saja. Pada tahun 2017, parlemen Selandia Baru menetapkan Sungai Whanganui sebagai pribadi pemilik dasar sungainya sendiri (Parlemen Selandia Baru, 2017, Klausul 19). Sebelumnya, telah ditetapkan bahwa kawasan lindung Te Urewera adalah badan hukum, dengan ‘semua hak, kekuasaan, kewajiban, dan tanggung jawab

sebuah badan hukum’ (Parlemen Selandia Baru, 2014, Bagian 11(1)). Beberapa pengadilan India prakemerdekaan menetapkan masjid di Punjab dan patung Hindu tertentu sebagai ‘pribadi’ dengan kapasitas untuk memiliki properti atau untuk menggugat (*Masjid Shahid Ganj and others v. Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee*, 1938; *Pramatha Nath Mullick v. Pradyumna Kumar Mullick*, 1925). Negara-negara *civil law*, yang sistem hukumnya berasal dari hukum Romawi, juga bergerak ke arah yang sama (*AFADA v. Mendoza Zoo and City*, 2016; Tello, 2016). Pada tahun 2018, Mahkamah Agung Kolombia menetapkan hutan hujan Amazon sebagai ‘suatu subyek badan yang memiliki hak’, atau dengan kata lain sebagai ‘pribadi’ (Mahkamah Agung Kolombia, 2018).



Selama bertahun-tahun, NhRP telah membuat sejumlah keputusan mengenai cara terbaik untuk melakukan kampanye strategis berkelanjutan pertama di dunia untuk hak legal hewan nonmanusia. NhRP memilih simpanse sebagai penggugat pertama, terutama karena penelitian ekstensif selama puluhan tahun terhadap kemampuan berpikirnya yang sangat kompleks telah mengungkapkan bahwa simpanse memiliki kemandirian dan serupa dengan manusia, dan oleh karenanya lebih dapat dimengerti oleh manusia. NhRP kemudian memutuskan untuk membuktikan bahwa simpanse memiliki hak legal berdasarkan *common law*, yang biasanya digunakan oleh hakim *common law* saat memutuskan kasus yang keluarannya tidak dimandatkan oleh undang-undang, konstitusi, atau perjanjian (*NhRP ex rel. Tommy v. Lavery*, 2013). NhRP



menduga bahwa hakim dalam perkara ini akan menafsirkan kata 'pribadi' dalam konteks suatu undang-undang atau konstitusi, sehingga menyimpulkan (setidaknya pada awalnya) bahwa istilah ini tidak ditujukan untuk mencakup hewan nonmanusia. Namun demikian, fleksibilitas disebut-sebut sebagai keunggulan dari *common law*, sehingga hakim diwajibkan untuk menciptakan hukum dalam celah ketiadaan pengaturan oleh undang-undang dan konstitusi agar hukum tersebut dapat sejalan dengan penemuan ilmiah dan evolusi adat istiadat masyarakat serta pengalaman manusia (Morrow, 2009, hal. 158). Hakim perlu diyakinkan bahwa, demi keadilan, setidaknya beberapa hewan nonmanusia harus dianggap sebagai pribadi yang memiliki sekurangnya beberapa hak.

NhRP memutuskan bahwa gugatan awal yang diajukannya akan berfokus pada hak simpanse atas kebebasan jasmani, mengingat ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa kera sebagai makhluk yang memiliki kemandirian berkepentingan dalam kebebasan ini, dan karena manusia dapat dengan mudah memiliki keterkaitan dengan kepentingan ini (*NhRP ex rel. Tommy v. Lavery*, 2013). Langkah selanjutnya mencakup identifikasi terhadap argumentasi hukum yang persuasif. Untuk itu, NhRP pertama-tama mempelajari segala nilai dan prinsip peradilan yang diklaim merupakan keadilan oleh pengadilan-pengadilan yang berada di wilayah yurisdiksi yang berpotensi menjadi sasaran, termasuk setiap wilayah yurisdiksi AS dan sebagian besar wilayah yurisdiksi penganut *common law* lainnya di seluruh dunia. Setelah memutuskan wilayah yurisdiksi mana yang akan melakukan litigasi, NhRP akan menyesuaikan argumentasi hukumnya dengan nilai dan prinsip yang berlaku.

Ternyata hampir semua hakim *common law* di mana pun menganggap bahwa otonomi, yaitu kebebasan seseorang untuk bebas memilih (dalam berbagai parameter) dan bagaimana keinginannya untuk menjalani hidupnya, merupakan hal yang sangat penting. Sebagai contoh, merujuk pada keputusan tentang perawatan medis, pengadilan tertinggi New York, yakni Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa:

Dalam sistem pemerintahan bebas yang kita anut, yang menghargai gagasan mengenai kemandirian perorangan dan kebebasan memilih, orang yang bersangkutanlah yang berhak menentukan keputusan akhir terkait perawatan medis yang dijalankannya untuk menjamin agar perlindungan terbesar yang dapat ia peroleh dari otonomi dan kebebasan yang ia miliki terhindar dari segala intervensi yang tidak ia kehendaki, sebagaimana didukung oleh kehendaknya sendiri (*Rivers v. Katz*, 1986, hal. 493).

NhRP tidak mengklaim bahwa kemandirian merupakan satu-satunya syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh hak (*NhRP ex rel. Tommy v. Lavery*, 2013). Setelah melakukan analisis hukum, NhRP mengumpulkan fakta ilmiah yang mendukung kemandirian simpanse dari para ahli terkemuka terkait kemampuan berpikir dan perilaku simpanse di seluruh dunia. Ilmuwan-ilmuwan ini (di antaranya James Anderson, Christophe Boesch, Jennifer Fugate, Jane Goodall, Mary Lee Jensvold, James King, Tetsuro Matsuzawa, William C. McGrew, Mathias Osvath, dan Emily Sue Savage-Rumbaugh) menyampaikan surat pernyataan sumpah yang mendukung untuk setiap kasus (NhRP, tanpa tahun-c).

Nilai dan prinsip peradilan mencakup beberapa rasa kesetaraan. Untuk itu, NhRP menekankan dua dari kasus *Romer v. Evans* tahun 1996. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung Federal Amerika Serikat menghapus amandemen Undang-Undang Dasar Negara Bagian Colorado yang berisi pencabutan undang-undang yang berlaku mengenai larangan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual. Mahkamah Agung menyatakan bahwa, demi perlindungan yang setara, klasifikasi yang menggunakan karakteristik tunggal untuk menyangkal suatu perlindungan kelas di dewan merupakan 'hal yang terlalu sempit sekaligus terlalu luas'. Hal ini mengidentifikasi orang tertentu dengan menggunakan karakteristik tunggal, kemudian menyatakan bahwa mereka tidak memiliki perlindungan di dewan tersebut (*Romer v. Evans*, 1996, hal. 633). Dengan menggunakan garis penalaran yang sama, NhRP berencana untuk membuktikan bahwa karakteristik tunggal yang tidak sesuai dalam hal ini adalah spesies. Mahkamah Agung juga menyatakan

bahwa amandemen tersebut melanggar persyaratan yang mengharuskan agar suatu klasifikasi memiliki hubungan rasional dengan beberapa 'tujuan yang sah dalam undang-undang' (hal. 633). Oleh karena itu, NhRP berencana untuk membuktikan bahwa pengurangan secara sewenang-wenang terhadap makhluk otonom/mandiri dari spesies apa pun bukan tujuan yang sah bagi pemerintahan mana pun.

Pada akhirnya, NhRP memutuskan untuk membawa surat perintah pengadilan habeas corpus atas nama penggugatnya (*NhRP ex rel. Tommy v. Lavery*, 2013). *Habeas corpus* merupakan bahasa Latin untuk 'Anda memiliki tubuh' dan disebut sebagai 'surat perintah pengadilan' (*Hamdi v. Rumsfeld*, 2004, hal. 536). Dalam sebuah kasus yang diajukan oleh NhRP atas nama dua simpanse, yaitu Hercules dan Leo, Mahkamah Agung New York menemukan bahwa:

"Surat perintah *habeas corpus* berada dalam jantung kebebasan kita" [...] dan berakar kuat dalam gagasan-gagasan kita yang berharga mengenai otonomi individu dan kebebasan memilih [...]. Sebagai 'pemulihan terhadap pemenjaraan ilegal', surat perintah ini disebut sebagai 'yang terbaik dari semua surat perintah yang ada' dan 'benteng besar kebebasan'. [...] Surat perintah *habeas corpus* "telah menjadi hal yang begitu dihargai oleh beberapa generasi bangsa yang merdeka [sic] yang telah belajar dari pengalaman yang mengungkapkan bahwa surat perintah ini dapat memberikan satu-satunya perlindungan yang dapat diandalkan bagi kebebasan mereka" (*NhRP ex rel. Hercules and Leo v. Stanley*, 2015, hal. 903).

Mengingat surat perintah *habeas corpus* hanya dapat diberlakukan atas nama seseorang dan bukan benda, maka paradoks pun muncul setiap kali surat perintah ini digunakan untuk menuntut agar suatu benda (baik budak manusia ataupun simpanse) diakui sebagai pribadi. Pada abad ke-18 di Inggris, Lord Mansfield beranggapan bahwa James Somerset *mungkin* adalah seorang pribadi sehingga ia pun mengeluarkan surat perintah tersebut (*Somerset v. Stewart*, 1772). Namun demikian, sebelum terjadinya perang saudara di Amerika Serikat (AS), pengadilan di negarane-negara bagian selatan dengan suara bulat menolak mengakui budak sebagai pribadi dan meng-

klaim budak sebagai benda dengan berbagai alasan (Finkelman, 2012). NhRP menentang paradoks ini setiap kali pihaknya meminta agar pengadilan menerbitkan surat perintah tersebut atas nama hewan nonmanusia. NhRP merespons hal ini dengan mendesak pengadilan untuk mencontoh kasus Lord Mansfield, yaitu menerbitkan surat perintah dan kemudian menyelenggarakan persidangan yang, dalam kasus Somerset, membuat Lord Mansfield menyatakan bahwa perbudakan merupakan hal yang sangat ‘menjijikkan’ sehingga *common law* tidak akan mendukungnya dan memerintahkan Somerset untuk dilepaskan. Dengan demikian, perbudakan manusia pun dengan mutlak dihapuskan di Inggris (*Somerset v. Stewart*, 1772, hal. 19).

Untuk mengubah sifat kebendaan pada hewan nonmanusia, seorang hakim pertamanya harus dapat membayangkan bahwa suatu benda dapat saja merupakan suatu pribadi. Jika

tidak, bagaimana mungkin seorang hakim dapat membedakan klaim simpanse dari klaim kursi? Lord Mansfield memahami bahwa seorang budak mungkin adalah suatu pribadi. Serupa halnya dengan beberapa hakim yang dapat membayangkan bahwa simpanse mungkin saja merupakan suatu pribadi, sedangkan hakim lainnya tidak beranggapan demikian.

Membuktikan Kemampuan Simpanse dalam Berpikir Kompleks dan Kemandiriannya

Setelah menyusun kerangka kerja untuk suatu strategi hukum, NhRP mengidentifikasi ahli-ahli yang disebutkan di atas yang setuju untuk mengajukan surat pernyataan sumpah yang membuktikan bahwa simpanse memi-



Foto: Manusia dan simpanse menunjukkan kesadaran dirinya melalui pengenalan diri di cermin, sekaligus menunjukkan kapasitas yang muncul dari kesadaran diri tersebut, seperti misalnya pembedaan diri dan refleksi diri. Negra, CSNW. © Chimpanzee Sanctuary Northwest

liki kemandirian (NhRP, tanpa tahun-c). Salah satu di antaranya, yakni profesor psikologi James King yang membantu mendefinisikan kemandirian sebagai berikut.

Perilaku yang mencerminkan suatu pilihan dan tidak didasari pada ketidaksengajaan, perilaku bawaan, atau kategori pembelajaran konvensional, seperti misalnya penentuan syarat, pembelajaran diskriminasi, atau pembentukan konsep. Sebaliknya, perilaku mandiri menyiratkan bahwa individu mengendalikan perilaku berdasarkan beberapa proses kognitif internal yang tidak dapat diamati (King, 2013, paragraf 11).

Hal ini tidak mengejutkan karena manusia dan simpanse memiliki hampir 99% DNA yang sama dan secara evolusioner lebih dekat hubungannya daripada simpanse dan gorila (IUCN SSC, tanpa tahun.; Smithsonian Institute, tanpa tahun; Varki dan Altheide, 2005; lih. Kera: Sebuah Tinjauan Umum). Oleh karena itu, manusia dan simpanse memiliki sejumlah kesamaan karakter dan sifat (Anderson, 2013; Boesch, 2013; Fugate, 2013; Jensvold, 2013; King, 2013; Matsuzawa, 2013; McGrew, 2013; Osvath, 2013; Savage-Rumgaugh, 2013):

- Baik otak maupun perilaku manusia dan simpanse bersifat plastis, fleksibel, dan sangat bergantung pada pembelajaran. Otak manusia dan simpanse berkembang dan menjadi sempurna dengan cara yang sama, yang menunjukkan bahwa manusia dan simpanse mengalami tahap perkembangan kognitif yang sama.
- Kedua spesies ini mengalami 'peningkatan kesadaran dan pemahaman akan diri sendiri saat menginjak masa dewasa, melalui budaya dan pembelajaran yang diperolehnya' (Savage-Rumgaugh, 2013, hal. 6).
- Simpanse dan manusia memiliki kesamaan 'proses kognitif fundamental' yang mendasari perasaannya sebagai agen independen, yang merupakan komponen fundamental bagi otonomi (Matsuzawa, 2013, hal. 7).
- Keduanya menunjukkan kesadaran akan dirinya sendiri setelah melakukan uji pengenalan diri di depan cermin, sekaligus

menunjukkan kapasitas yang muncul dari kesadaran diri tersebut, seperti misalnya pemantauan diri dan refleksi diri. Keduanya juga sadar akan apa yang diketahui dan tidak diketahuinya.

- Simpanse menunjukkan komunikasi, percakapan, pengambilan perspektif, imajinasi, dan humor yang bermakna.
- Simpanse dapat menunjukkan rasa humor dan gelak tawa di berbagai kondisi yang sama di mana manusia juga turut tertawa.
- Simpanse menunjukkan dan menyuarakan apa yang mereka inginkan kepada individu lain untuk memberitahukan sesuatu dan dapat 'menyesuaikan gesturnya agar mereka benar-benar diperhatikan' (Anderson, 2013, hal. 5). Simpanse dapat memberitahukan apa yang akan mereka lakukan, ke mana mereka pergi, dan bantuan apa yang mereka inginkan dari individu lain. Mereka dapat memberikan tanggapan dan menyampaikan apa yang mereka rasakan kepada individu lain, menjawab pertanyaan mengenai apa yang disukai dan tidak disukai temannya, dan memberitahukan apa yang mereka lain inginkan kepada peneliti. Simpanse yang memahami bahasa Inggris lisan dapat menjawab pertanyaan 'ya/tidak' mengenai pemikiran, rencana, perasaan, maksud, ketidaksukaan, dan kesukaannya.
- Baik simpanse pengguna bahasa yang berada dalam kurungan maupun simpanse liar dapat memahami percakapan timbal balik dan dapat menyesuaikan cara berkomunikasi dengan kondisi perhatian yang diberikan partisipan lainnya dengan menggunakan gestur visual kepada temannya yang menunjukkan perhatian maupun gestur yang lebih taktil dan terdengar kepada temannya yang kurang menunjukkan perhatian.
- Simpanse dapat terlibat dalam sekurangnya enam bentuk permainan imajiner, termasuk animasi, yang meliputi kegiatan berpura-pura bahwa suatu objek tak bernyawa adalah objek hidup; dan substitusi yang meliputi kegiatan berpura-pura bahwa suatu objek adalah benda lain; dan menggunakan bahasa isyarat pribadi imajiner di mana sim-

“ Untuk mengubah sifat kebendaan pada hewan nonmanusia, seorang hakim pertama-tama harus dapat membayangkan bahwa suatu benda dapat saja merupakan suatu pribadi. ”

panse memberikan suatu isyarat atau petunjuk dengan maksud yang berbeda.

- Oleh karena simpanse memiliki sistem saraf cermin yang memungkinkannya 'berbagi dan memahami keadaan emosi individu lain', simpanse pun dapat menyesuaikan diri dengan pengalaman, perspektif visual, pengetahuan, serta ekspresi dan keadaan emosi individu lain (Fugate, 2013, hal. 5). Hal ini membentuk dasar untuk sikap empati (kemampuan menempatkan diri sendiri dalam situasi individu lain serta mengidentifikasi dan memahami 'situasi, perasaan, dan motif individu lain') yang berkaitan dengan pengenalan diri. Dengan demikian, simpanse dapat menunjukkan kepeduliannya terhadap individu lain dalam situasi berbahaya (Anderson, 2013, hal. 4).
- Baik simpanse yang berada dalam kurungan maupun liar dapat melakukan upaya pengelabuan taktis yang pintar, yang merupakan kemampuan terkait permainan imajiner. Dengan perilaku yang memerlukan upaya untuk menghubungkan keadaan mental dan motif dengan individu lainnya ini, simpanse mampu merancang taktik sekaligus strategi tandingan untuk mengecoh kelompok lain.
- Simpanse mampu membuat alat. Hal ini menyiratkan bahwa simpanse memiliki keterampilan memecahkan permasalahan rumit dan memahami hubungan sebab-akibat dari permasalahan tersebut. Simpanse menggunakan 'seperangkat alat', yaitu dua alat atau lebih dengan urutan tertentu, untuk mencapai tujuan. Sebagai contoh, simpanse dapat menggunakan lima objek (alat penumbuk, pembuat lubang, pembesar, pengumpul, dan penyeka) untuk memperoleh madu. Penggunaan alat canggih seperti ini memerlukan pemilihan objek yang tepat dalam suatu urutan kompleks guna mencapai tujuan yang dikehendaknya melalui proses tersebut. Pengurutan dan gambaran mental merupakan tanda kesengajaan, pengaturan diri, dan mandiri (McGrew, 2013, hal. 6).
- Terdapat sekurangnya 40 budaya simpanse liar di seluruh Afrika dengan kombinasi lebih dari 65 perilaku yang teridentifikasi. Setiap kelompok budaya simpanse liar

membuat dan menggunakan 'seperangkat alat' unik, yang menunjukkan bahwa simpanse membentuk gambaran mental mengenai urutan tindakan guna mencapai suatu tujuan (McGrew, 2013, hal. 7). Perangkat alat ini merupakan kumpulan 20 alat berbeda yang unik, yang sering digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah makanan, membuat sarang yang nyaman dan aman untuk tidur di atas pohon, dan untuk kebersihan serta kenyamanan pribadi. Perangkat alat ini bervariasi di setiap kelompok. Simpanse mempelajarinya dengan mengamati individu lain yang menggunakannya.

- Sehubungan dengan budaya sosial, simpanse mewariskan atraksi dan tradisi sosial yang sangat bervariasi dari generasi ke generasi. Dengan demikian, dalam satu kelompok simpanse, 'gerakan simbolis apa pun' dapat berfungsi menyampaikan keinginan untuk melakukan hubungan seks. Sedangkan di kelompok lainnya, terdapat gerakan simbolis berbeda yang menunjukkan keinginan yang sama (McGrew, 2013, hal. 10).
- Kemampuan mental terpenting untuk manifestasi budaya adalah imitasi dan emulasi, yang keduanya memerlukan pembelajaran dengan cara melakukan pengamatan. Simpanse menggunakan kedua kemampuan tersebut. Simpanse juga melakukan 'imitasi tertunda' yang mencakup peniruan tindakan yang pernah mereka lihat sebelumnya. Perilaku ini bergantung pada kapasitas yang lebih tinggi daripada imitasi langsung, karena simpanse harus mengingat tindakan individu lain dan kini menirunya. Kapasitas untuk melakukan imitasi dan emulasi ini diperlukan untuk 'evolusi budaya kumulatif' yang memungkinkan simpanse untuk mengacu pada, dan mempertahankan, tradisi dalam kelompok (McGrew, 2013, hal. 11).
- Simpanse memiliki kepekaan terhadap 'angka', sehingga mereka pun memiliki pemahaman tentang jumlah.

Kemampuan kognitif simpanse, baik secara terpisah maupun bersama, terbukti penting bagi hakim yang jujur berjuang untuk menentukan apakah, dan sejauh

“Simpanse menunjukkan komunikasi, percakapan, pengambilan perspektif, imajinasi, dan humor yang bermakna.”

“Strategi jangka panjang NhRP mengasumsikan bahwa jika hakim yang adil terus menerus dihadapkan pada bukti yang meyakinkan dari ahli mengenai kemampuan berpikir simpanse yang kompleks dan kemendiriannya, disertai dengan argumentasi hukum yang kuat yang berasal dari nilai dan prinsip yang secara rutin diterapkan oleh para hakim itu sendiri, maka mereka pun akan berjuang dengan itikad baik untuk mengatasi sikap berat sebelah yang tidak disadarinya tersebut.”

mana, simpanse harus menjadi pribadi legal dengan hak-hak asasi tertentu (NhRP ex rel. *Tommy v. Lavery*, 2018, hal. 1057–8; Anderson, 2013; Boesch, 2013; Fugate, 2013; Jensvold, 2013; King, 2013; Matsuzawa, 2013; McGrew, 2013; NhRP, tanpa tahun.-c; Osvath, 2013; Savage-Rumbaugh, 2013).

Melibatkan Nilai dan Prinsip Hakim AS

NhRP mendasarkan argumentasi hukumnya pada nilai dan prinsip hakim dalam yurisdiiksi mana pun yang diperkarakannya dengan tujuan untuk membuat para hakim hanya memiliki empat potensi tanggapan. NhRP mengelompokkan hakim menjadi empat kategori yang sesuai.

‘Hakim yang adil’ adalah hakim yang memberlakukan nilai dan prinsip keadilan dasar pada yurisdiksinya terhadap klaim yang diajukan atas nama simpanse. Para hakim tersebut mengakui kera besar ini sebagai individu yang memiliki kapasitas untuk memperoleh hak. Kemudian, mereka juga mempertimbangkan dengan adil hak apa yang harus diberikan kepada simpanse.

Kategori kedua, yakni ‘hakim pengulur waktu’, adalah hakim yang akan berargumen bahwa keadilan yang berada dalam kekuasaannya *tampaknya* hanya didasari pada nilai dan prinsip dasar tertentu, walaupun sesungguhnya tidak. Posisi ini menguntungkan bagi NhRP untuk mengajukan gugatan baru yang menuntut diperbarainya nilai dan prinsip tersebut. Hingga saat ini, tidak ada pengadilan AS yang berada dalam posisi ini.

‘Hakim yang secara implisit berat sebelah’ dapat merusak nilai dan prinsip keadilan dasarnya sendiri dengan mendasarkan keputusannya pada prasangka yang tersirat sehingga menimbulkan ‘prasangka yang berbentuk hukum’ (Yankwich, 1959, hal. 257). Untuk diperhatikan bahwa:

Hakim masa kini dibesarkan dalam budaya yang secara mendarah daging menganggap bahwa semua hewan nonmanusia adalah ‘benda’. Seperti halnya dengan sebagian besar penduduk di negara tersebut, sebagian besar hakim rutin terlibat setiap hari dalam eksploi-

tasi hewan nonmanusia secara besar-besaran, yakni dengan memakan, memakai, dan memburu hewan nonmanusia, serta terlibat dalam berbagai cara eksploitasi lainnya yang telah lama diterima dalam budayanya. Jika berbicara tentang manusia, berbagai kluster neuron secara tidak sadar akan terpicu, tergantung pada sejauh mana subyek tersebut diidentifikasi. Bayangkan, betapa berbedanya kecenderungan hakim dalam memandang sesuatu, bahkan terhadap sesuatu yang memiliki kekerabatan begitu dekat dengan manusia seperti simpanse (Wise, 2017a, hal. 13–14).

Oleh karena itu, banyak hakim yang kemungkinan secara implisit berat sebelah dalam menentang argumentasi yang dilontarkan NhRP, sebagaimana kebanyakan orang cenderung berat sebelah dalam hal ras, gender, orientasi seksual, agama, berat badan, usia, dan etnis (Eberhardt, 2019; Project Implicit, tanpa tahun). Fenomena berat sebelah ini menunjukkan bahwa ‘pikiran kita dibentuk oleh budaya di sekitar kita. Namun nyatanya, budaya tersebut telah mengambil alih pikiran kita’ (Banaji dan Greenwald, 2014, hal. 138–9).

Para hakim yang secara implisit berat sebelah ini tidak menghiraukan nilai dan prinsip keadilan dasar yang dimilikinya untuk bersikeras, *secara sementara atau melalui penyalahgunaan yurisprudensi atau prinsip*, bahwa hal ini tidak dapat diberlakukan pada hewan nonmanusia. Menurut mereka, hak asasi hanya berlaku bagi manusia, hanya karena mereka adalah insan manusia. Namun demikian, seperti yang dikatakan Martin Luther King Jr., “Ketidakadilan di suatu tempat adalah ancaman bagi keadilan di mana pun” (King, 1963). Hal tersebut menunjukkan bahwa mengabaikan alasan untuk hak asasi yang menyertai hewan nonmanusia sama saja dengan mengabaikan alasan bagi hak asasi manusia. Selain itu, Robert Cover yang mengamati para hakim yang menjunjung praktik perbudakan manusia pada abad ke-19 berpendapat bahwa kisah mereka adalah “kisah tentang pilar-pilar kehormatan hukum yang penuh kesungguhan dan itikad baik dan tentang keterlibatan mereka dalam sistem penindasan” (Cover, 1975, hal. 6).

Keputusan untuk mencabut semua hak hewan nonmanusia semata-mata hanya karena mereka bukanlah manusia adalah contoh dari penilaian yang berat sebelah. Sikap berat sebelah yang secara implisit dilakukan oleh para hakim AS menyebabkan mereka mengabaikan nilai dan prinsip dasarnya sendiri, dan tidak menerapkannya pada hal-hal yang dikecualikan dari keadilan. Hakim-hakim ini dulu menolak memberikan hak legal kepada warga kulit hitam. Mahkamah Agung AS pernah membatasi hak legal untuk berhubungan seks kepada warga heteroseksual dan memenjarakan warga AS keturunan Jepang dalam kamp hanya karena asal-muasal mereka (*Bowers v. Hardwick*, 1986; *Korematsu v. United States*, 1944). Pengadilan membatasi 'kepribadian hukum' hanya untuk laki-laki atau menolak untuk memberikan hak yang sama kepada perempuan hanya karena mereka adalah perempuan. Salah satu contoh kasusnya adalah Lavinia Goodell yang pada tahun 1875 meminta izin masuk ke salah satu bar di Wisconsin, tetapi aksesnya ditolak hanya karena dia adalah seorang perempuan (Mahkamah Agung Wisconsin, 1875). Pengadilan menyatakan bahwa:

Hukum alam menakdirkan dan menentukan manusia berjenis kelamin perempuan untuk melahirkan dan mengasuh anak-anak dari kalangan manusia, dan menjaga serta merawat keluarga dengan penuh rasa cinta dan hormat. Selain itu, semua tugas seumur hidup perempuan tidaklah sesuai dengan tugas radikal dan suci berdasarkan jenis kelamin ini, seperti halnya dengan profesi hukum yang merupakan penyimpangan dari tatanan alam; dan jika dilakukan secara sukarela, maka hal tersebut hanya akan menjadi suatu bentuk pengkhianatan terhadap tatanan tersebut (Mahkamah Agung Wisconsin, 1875, hal. 245).

Hakim di kategori keempat, yakni 'hakim pengelak', menginginkan agar kasus-kasus NhRP diselesaikan tanpa dinilai kualitasnya terlebih dahulu. Para hakim ini dapat menolak gugatan yang menuntut diberikannya hak legal bagi simpanse berdasarkan suatu titik prosedural atau menolak mendengar argumentasi atau mengeluarkan surat perintah pengadilan.

Strategi jangka panjang NhRP mengasumsikan bahwa jika hakim yang adil terus-menerus

dihadapkan pada bukti yang meyakinkan dari ahli mengenai kemampuan berpikir simpanse yang kompleks dan kemandiriannya, disertai dengan argumentasi hukum yang kuat yang berasal dari nilai dan prinsip yang secara rutin diterapkan oleh para hakim itu sendiri, maka mereka pun akan berjuang dengan itikad baik untuk mengatasi sikap berat sebelah yang tidak disadarinya tersebut. Harapannya adalah agar para hakim ini dapat membuat keputusan yang tepat secara legal, historis, politis, dan moral bahwa hewan nonmanusia berkemandirian layak mendapatkan hak asasi yang dapat melindungi kepentingan dasarnya.

Fokus Kampanye Legal Simpanse di Negara Bagian New York

Setelah melakukan persiapan selama 28 tahun, pada bulan Desember 2013, NhRP memulai kampanye litigasi strategis jangka panjangnya. NhRP mengajukan gugatan *habeas corpus* pertamanya atas nama Tommy, satu individu simpanse yang sudah lama dikurung di pelataran parkir trailer bekas di Fulton County, pusat Kota New York, beberapa mil dari gedung pengadilan. Di sana, NhRP pertama kali menjumpai hakim yang secara implisit berat sebelah, yang tanpa penjelasan lebih lanjut menyatakan kesimpulan persidangan sebagai berikut.

Pernyataan yang Anda sampaikan secara berapi-api kepada pengadilan ini cukup mengagumkan. Akan tetapi, pengadilan tidak akan menanggapi permohonan tersebut dan tidak akan menganggap simpanse sebagai manusia ataupun pribadi yang dapat memperoleh surat perintah *habeas corpus* berdasarkan Pasal 70. Saya bersedia menjadi hakim untuk gugatan apa pun guna meluruskan segala tindakan yang salah yang telah dilakukan kepada simpanse ini karena saya mengerti maksud ucapan Anda. Meskipun Anda membuat argumentasi yang sangat kuat, saya tidak setuju dengan argumentasi tersebut yang, sejauh ini, menganggap Pasal 70 seolah-olah berlaku bagi simpanse (Mahkamah Agung Negara Bagian New York, 2013c, hal. 26).



Foto: Pada tahun 2013, NhRP mengajukan gugatan pertamanya atas pelanggaran hukum terhadap Tommy, simpanse yang sudah lama dikurung di pelataran parkir trailer di Kota New York. Tommy. © "Unlocking the Cage" Pennebaker Hegedus Films

Pada kesempatan selanjutnya, NhRP mengajukan gugatan atas nama simpanse bernama Kiko yang dikurung di sebuah etalase toko di wilayah Niagara, New York, dekat perbatasan Kanada. Pada saat itu, NhRP menjumpai hakim kedua yang secara implisit berat sebelah. Hakim tersebut hendak meninjau sejumlah dokumen terlebih dahulu sebelum mengeluarkan argumentasi lisan melalui telepon pada pekan selanjutnya, di mana ia menyimpulkan bahwa:

Saya akui dokumen Anda sangat luar biasa [...]. Akan tetapi, saya belum siap mengambil risiko dan akan menolak permohonan petisi untuk menuntut dikeluarkannya surat perintah *habeas corpus*. Saya pribadi merasa bahwa kasus ini cenderung merupakan persoalan legislatif daripada persoalan peradilan (Mahkamah Agung Negara Bagian New York, 2013b, hal. 15).

Ketika hakim tersebut secara tak terduga berupaya menghentikan banding yang diajukan NhRP dengan menolak melakukan tindakan pendukung yang diperlukan, maka NhRP pun terpaksa mengupayakan tindakan dari pengadilan banding yang mengawasi hakim tersebut. Secara khusus, NhRP mengajukan permohonan atas surat perintah *mandamus* yang bersifat

langka, yakni permohonan untuk dikeluarkannya perintah yang mewajibkan pejabat publik (dalam kasus ini, hakim tersebut) melakukan tugas non-diskresinya (*NhRP ex rel. Kiko v. Boniello dan Presti*, 2014). Hakim tersebut kemudian melakukan tindakan yang diperlukan dan proses banding pun dilanjutkan.

Dua hari kemudian, NhRP mengajukan gugatan di Suffolk County di Long Island, New York atas nama Hercules dan Leo, dua simpanse muda yang diambil dari induknya di Louisiana ketika mereka berumur dua tahun dan kemudian dikurung di sebuah kandang yang ada di ruang bawah tanah gedung komputer Universitas Stony Brook selama sekitar enam tahun. Di universitas tersebut, kedua simpanse ini diberikan 'anestesi umum/general anesthesia' hampir setiap bulan dan otot-ototnya dipasang kawat. Hal tersebut untuk membantu para peneliti agar lebih bisa memahami bagaimana simpanse dapat memiliki kaki bengkok. Dalam kasus ini, hakim tidak menghiraukan pengacara NhRP, tetapi justru tergesa-gesa menuliskan dua kalimat penolakan (NhRP, tanpa tahun-d; Mahkamah Agung Negara Bagian New York, 2013a).

Negara Bagian New York memiliki empat pengadilan banding perantara yang menerima banding berdasarkan wilayah geografis.

Departemen peradilan pertama meliputi wilayah Manhattan dan Bronx, departemen kedua bertanggung jawab atas Kota New York dan wilayah yang berada di bagian selatan negara bagian, departemen ketiga menerima banding dari wilayah yang berada di pusat dan bagian utara Kota New York, dan yang keempat menangani wilayah yang berada di bagian barat (NYCourts.gov, tanpa tahun). Pada awal tahun 2014, NhRP mengajukan banding atas pemberhentian kasus Hercules dan Leo kepada departemen peradilan kedua, di mana NhRP pertama kali menjumpai pengadilan yang mengelak, yang mengambil langkah luar biasa untuk menghentikan banding tersebut tanpa memberikan kesempatan bagi NhRP untuk memberikan keterangan singkat ataupun argumennya. Putusan ini jelas adalah suatu kesalahan, meskipun bukan merupakan suatu ketidaksengajaan. Pengadilan menegaskan kesalahan NhRP bahkan setelah NhRP menunjukkan bahwa pihaknya memiliki hak mutlak untuk mengajukan banding (NhRP, tanpa tahun-d; Mahkamah Agung Negara Bagian New York, 2014). Sebagai tanggapan, NhRP memutuskan untuk mengajukan gugatan ulang kasus ini di pengadilan lainnya pada lain waktu.

NhRP saat ini mengajukan banding untuk kasus Tommy kepada departemen peradilan ketiga yang terbukti merupakan paradigma dari pengadilan yang secara implisit berat sebelah. Ketidaksepakatan hakim dengan NhRP terutama mengenai apakah 'orang' harus memiliki kapasitas untuk memiliki hak *atau* kewajiban, atau keduanya, baik hak *maupun* kewajiban. Dalam mengeluarkan putusan terkait hal ini, pengadilan merujuk sebagian pada definisi 'orang' dalam *Black's Law Dictionary*, yakni kamus yang paling banyak digunakan dalam hukum AS, yang menyatakan bahwa seseorang harus mampu dibebani dengan hak maupun kewajiban (*People ex rel. NhRP v. Lavery*, 2014, hal. 151; Garner, 2014). Jika saja pengadilan memeriksa satu-satunya sumber yang digunakan dalam *Black's Law Dictionary*, pengadilan tersebut mungkin akan menyadari bahwa sumber yang dimaksud sesungguhnya mendukung NhRP. Ketika NhRP membawa kekeliruan tersebut kepada pemimpin redaksi kamus terkait, pemimpin redaksi tersebut berjanji bah-

wa volume selanjutnya akan memberikan definisi yang tepat (B. A. Garner, komunikasi pribadi, 2018; NhRP, tanpa tahun-c).

Tetapi hal ini sudah terlambat bagi Tommy. Pengadilan Tommy, tanpa penjelasan atau bukti ilmiah yang mendukung, mengklaim bahwa simpans tidak memiliki kapasitas untuk memikul kewajiban dan tidak memberikan kesempatan bagi NhRP untuk membantah kesimpulan tersebut (*People ex rel. NhRP v. Lavery*, 2014, hal. 152). NhRP melanjutkan upaya untuk membuktikan bahwa pengadilan tersebut salah, tetapi lagi-lagi sudah terlambat bagi Tommy. Lebih lanjut, pengadilan Tommy tidak pernah memberikan penjelasan yang telah dipertimbangkan mengenai alasan mengapa kemampuan memikul kewajiban hukum memengaruhi apakah makhluk berkemandirian dari spesies apa pun memiliki hak untuk tidak dikurung dengan sewenang-wenang. Pengadilan ini gagal memecahkan permasalahan yang jelas dihadapi oleh jutaan bayi, anak-anak, penyandang disabilitas kognitif, dan individu lainnya yang tidak dapat memikul tanggung jawab atau memiliki hak legal, termasuk *habeas corpus*. Alih-alih memberikan penjelasan, pengadilan justru mengakhiri persoalan tersebut dalam sebuah catatan kaki singkat.

Pada kenyataannya, beberapa manusia kurang mampu untuk memikul kewajiban atau tanggung jawab hukum dibandingkan manusia lainnya. Perbedaan ini tidak mengubah analisis kami karena tidak dapat dipungkiri bahwa secara kolektif, manusia memiliki kemampuan yang unik untuk memikul tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, keputusan ini seharusnya tidak dianggap sebagai pembatas hak manusia dalam konteks proses *habeas corpus* ataupun sebaliknya (*People ex rel. NhRP v. Lavery*, 2014, hal. 152, n. 3).

Hasilnya, untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun sejarah *common law*, pengadilan memutuskan bahwa satu-satunya jenis entitas yang dapat memiliki hak apa pun adalah mereka yang dapat memikul kewajiban, atau bahkan lebih janggal lagi, mereka yang merupakan bagian dari kumpulan entitas yang didefinisikan secara sewenang-wenang, yang beberapa di antaranya dapat memikul kewajiban.

Foto: Simpanse memikul tugas dalam komunitasnya, bekerja sama, membantu anggota komunitas yang cedera atau rentan, dan berbagi makanan dan tugas berburu. Simpanse di Bossou. © Susana Carvalho/KUPRI

Satu bulan kemudian, pengadilan di departemen peradilan keempat memberikan putusan yang menentang Kiko. Pengadilan tersebut mengakui hak NhRP untuk mengajukan banding dan menolak putusan pengadilan Tommy dengan dua kali mengasumsikan, tanpa memutuskan, bahwa simpanse dapat saja merupakan suatu ‘pribadi’. Hakim pengadilan, yang merupakan hakim yang secara implisit berat sebelah dan mengelak, entah mengapa mendasarkan keputusannya pada pemahaman dasar mengenai maksud dan tujuan NhRP. Mereka menyebut NhRP sebagai “suatu organisasi yang mengupayakan perlakuan dan tempat tinggal yang lebih baik bagi [...] primata nonmanusia” dan organisasi yang “hanya berupaya mengubah kondisi kurungan daripada mengganti kurungan itu sendiri” (*NhRP ex rel. Kiko v. Presti*, 2015, hal. 1334). Akibatnya, hakim dalam putusannya mengulangi bahwa “*habeas corpus* tidak berlaku jika pihak yang mengajukan petisi hanya mengupayakan perubahan pada kondisi kurungan daripada mengganti kurungan itu sendiri” (hal. 1335).

Akan tetapi, pengadilan Tommy tidak mempertimbangkan kekeliruan ini dan menyatakan bahwa: “Kami belum diminta untuk mengevaluasi kualitas tempat tinggal Tommy saat ini dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraannya” (*People ex rel. NhRP v. Lavery*, 2014, hal. 149). Pada tahun selanjutnya, Hakim Barbara Jaffe dari Mahkamah Agung wilayah New York menyetujui bahwa: “Kondisi tempat Hercules dan Leo dikurung tidak dibantah oleh pembuat petisi [...] persoalan satu-satunya adalah apakah Hercules dan Leo secara legal dapat dikurung” (*NhRP ex rel. Hercules and Leo v. Stanley*, 2015, hal. 901).

Tidak mengejutkan bahwasanya pengadilan tinggi New York menolak untuk menerima banding atas kasus Tommy ataupun Kiko, mengingat pengadilan tersebut hanya mengetahui sebagian kecil dari permohonan banding yang diajukan. Hakim pengadilan tinggi New York yaitu Eugene M. Fahey memberikan suara ‘tidak’ dalam voting yang dilakukan saat banding atas kasus Kiko kepada departemen peradilan keempat. Ia mungkin akan menyesali pilihannya.

Pada bulan April 2015, NhRP mengajukan kembali petisi *habeas corpus* atas Hercules dan Leo di Manhattan. Kemudian, untuk pertama kalinya, seorang hakim memberikan arahan berdasarkan ketetapan *habeas corpus* atas nama hewan nonmanusia. Arahan tersebut (yang diberikan oleh Hakim Barbara Jaffe) mengharuskan pihak dari Universitas Stony Brook untuk hadir di pengadilan dan memberikan alasan yang memadai secara hukum untuk mengurung simpanse. Dua bulan setelah persidangan tersebut, Hakim Jaffe merilis sebuah opini panjang yang menolak setiap serangan prosedural terhadap kemampuan NhRP untuk menyampaikan klaimnya. Opini ini menyetujui bahwa ‘pribadi’ bukanlah sinonim untuk ‘manusia’ (*NhRP ex rel. Hercules and Leo v. Stanley*, 2015, hal. 911). NhRP telah berupaya melepaskan Hercules dan Leo dan tidak hanya meminta perubahan atas kondisi kurungan (hal. 917), dan NhRP dapat mengajukan petisi kedua atas nama Hercules dan Leo (hal. 910). Namun demikian, Hakim Jaffe merasa terikat dengan kasus pemeliharaan Tommy:

Pengadilan [...] lambat dalam menerima perubahan, dan kadang tampak enggan terlibat dalam interpretasi hukum yang lebih luas dan inklusif jika hal tersebut hanya menghasilkan sedikit pertimbangan yang lebih baik. Seperti yang diamati dengan jitu oleh Hakim Kennedy dalam kasus *Lawrence melawan Texas* (meskipun dalam konteks berbeda), “waktu dapat membutakan kita terhadap kebenaran-kebenaran tertentu dan generasi selanjutnya dapat melihat bahwa hukum yang pernah dianggap perlu dan sesuai, sebenarnya hanya berfungsi untuk menindas”. [...] Kecepatannya mungkin sekarang meningkat [...]. Akan tetapi, untuk saat ini, mengingat yurisprudensi yang mengikat saya, [...] petisi untuk surat perintah *habeas corpus* ditolak dan prosesnya dihentikan (*NhRP ex rel. Hercules and Leo v. Stanley*, 2015, hal. 917–18).

Saat ini, NhRP mengumpulkan sejumlah surat pernyataan sumpah ilmiah tambahan yang membuktikan bahwa simpanse secara rutin memikul beragam tugas dalam komunitas simpanse liar, menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku, bekerja sama, menolong dan merawat anggota komunitas yang



cedera atau rentan, membagi tugas berburu dan makanan, dan memberitahukan anggota komunitas lainnya akan adanya bahaya. Dokumen ini juga membuktikan bahwa simpanse yang berada dalam kurungan memiliki tugas dalam komunitasnya maupun di dalam komunitas campuran simpanse-

manusia, selain bahwa mereka dapat membuat janji dan menepatinya, serta melakukan pekerjaan sehari-hari dan menunjukkan perilaku yang bermoral (Anderson, 2015; Boesch, 2015; Goodall, 2015; Jensvold, 2015; McGrew, 2015; NhRP, tanpa tahun-b; Savage-Rumbaugh, 2015).

“Simpanse dapat membuat alat untuk menangkap serangga; mengenali dirinya sendiri di hadapan cermin, foto, dan gambar televisi; meniru individu lain; menunjukkan kepedulian dan kesedihiannya ketika anggota komunitasnya mati; dan bahkan menunjukkan rasa humor.”

NhRP mengajukan kembali kasus Tommy dan Kiko di Manhattan dan kedua kasus tersebut diberikan kepada Hakim Jaffe, yang berpendapat bahwa pengadilan Tommy adalah tempat yang tepat untuk menangani legalitas penahanan Tommy dan bahwa NhRP tidak dapat mengajukan petisi kedua atas Tommy. Saat NhRP mengajukan banding ke departemen peradilan pertama, departemen ini menolak untuk menerima banding tersebut, seperti yang dilakukan oleh departemen kedua pada tahun 2014. Saat ini NhRP berjuang kembali, dengan dua kali menuntut haknya untuk mengajukan banding pada tahun berikutnya. Saat tuntutananya ditolak, NhRP mengambil langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yaitu menuntut departemen pertama *dalam* departemen pertama dan mendesak pengadilan untuk memerintahkan *dirinya sendiri* untuk mematuhi hukum. Hal ini pun benar-benar terjadi (NhRP, tanpa tahun-b).

Perjuangan menuju keberhasilan tersebut sangatlah terjal: pertanyaan hakim selama argumentasi lisan pada bulan Maret 2017 tak henti-hentinya menunjukkan sikap yang bermusuhan. NhRP dengan kecewa menyadari bahwa keputusan pengadilan tinggi New York pada tahun 1972 menjelaskan bahwa ‘manusia’ dan ‘pribadi’ bukanlah merupakan sinonim dan bahwa ‘kepribadian’ “bukan masalah penyesuaian biologis ataupun ‘alami’” (*Byrn v. NYCHHC*, 1972, hal. 201). Pengadilan tersebut memutuskan bahwa pengadilan yang lebih rendah memiliki hak untuk menolak kasus NhRP dengan alasan bahwa kasus tersebut adalah petisi berurutan, dan kemudian menyatakan secara sekilas tanpa adanya penjelasan bahwa Tommy dan Kiko tidak akan pernah memiliki hak asasi apa pun karena hak asasi hanya untuk manusia (*NhRP ex rel. Tommy v. Lavery*, 2017). Keputusan ini sangat tidak tepat sehingga NhRP secara rinci mencatat kekeliruannya, kalimat demi kalimat (Wise, 2017c). NhRP kembali berupaya mengajukan banding ke pengadilan tinggi dan banding ini pun ditolak lagi, tanpa komentar apa pun, pada bulan Mei 2018. Kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi.

Hakim Eugene M. Fahey, yang telah memilih untuk menolak banding pertama atas Tommy dan Kiko pada voting yang dilakukan tahun 2015, saat ini menjadi hakim

pengadilan tinggi AS pertama yang memberikan opini terhadap substansi argumen NhRP dan terhadap substansi keputusan merugikan dari departemen pertama, ketiga, dan keempat. Ia menganggap semua keputusan yang telah dibuat tidaklah benar (*NhRP ex rel. Tommy v. Lavery*, 2018).

Dalam opininya, Hakim Fahey secara khusus mengecam argumen pengadilan yang menyatakan bahwa simpanse tidak dapat dianggap sebagai suatu pribadi hanya “karena simpanse tidak memiliki ‘kapasitas atau kemampuan ... untuk dibebani kewajiban hukum, atau untuk bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya” (*NhRP ex rel. Tommy v. Lavery*, 2018, hal. 1056). Ia beropini sebagai berikut.

Pembuat petisi dan profesor pemberi pendapat hukum (*amici*), yaitu Laurence H. Tribe, Justin Marceau, dan Samuel Wiseman, mempertanyakan asumsi ini. Bahkan jika benar bahwa hewan nonmanusia tidak dapat dibebani kewajiban, maka kebenaran ini juga berlaku bagi bayi manusia atau manusia dewasa yang sedang dalam keadaan koma. Namun demikian, tidak ada yang mengira bahwa upaya memperoleh surat perintah *habeas corpus* atas nama seorang bayi [...] atau orang tua yang menderita demensia [...] merupakan tindakan yang tidak pantas dilakukan. Singkatnya, menjadi ‘agen moral’ yang dapat dengan bebas memilih untuk bertindak sesuai tuntutan moralitas bukanlah merupakan syarat yang diperlukan untuk menjadi ‘pasien moral’ yang dapat diperlakukan secara tidak adil dan mungkin memiliki hak untuk memperbaiki kesalahan (*lih. secara umum* Tom Regan, *The Case for Animal Rights* 151–156 [ed. kedua 2004]) (*NhRP ex rel. Tommy v. Lavery*, 2018, hal. 1057).

Fahey beralasan bahwa “kesimpulan departemen pertama yang menyatakan simpanse tidak dapat dianggap sebagai suatu ‘pribadi’ dan tidak berhak atas bantuan *habeas* sebenarnya hanya didasarkan pada tidak lebih dari suatu pemikiran bahwa simpanse bukan merupakan anggota spesies manusia (*NhRP ex rel. Tommy v. Lavery*, 2018, hal. 1057). Selanjutnya ia mengatakan bahwa:

Saya setuju dengan prinsip bahwa semua insan manusia memiliki martabat dan nilai intrinsik, dan memiliki [...] hak konstitusional khusus *habeas corpus*, terlepas dari apakah mereka adalah penduduk Amerika Serikat [...], akan tetapi, dalam meningkatkan status spesies kita, kita tidak harus merendahkan spesies dengan kecerdasan tinggi lainnya (*NhRP ex rel. Tommy v. Lavery*, 2018, hal. 1057).

Fahey mengakui bahwa NhRP menampilkan bukti bahwa simpanse adalah ‘mahluk yang mandiri dan cerdas’ dan mendesak rekan hakimnya untuk menanggapi ‘ketidakadilan nyata’ yang muncul dalam penentuan apakah hewan nonmanusia seperti simpanse berhak atas *habeas corpus* saat dirampas kebebasannya (*NhRP ex rel. Tommy v. Lavery*, 2018, hal. 1059). Fahey memperingatkan bahwa “permasalahan ini pada akhirnya harus diatasi” dan bertanya, “Apakah hewan nonmanusia berhak atas pelepasan dari kurungan melalui surat perintah *habeas corpus* dari pengadilan? Apakah mahluk ini harus diperlakukan sebagai suatu pribadi atau sebuah properti, yang pada dasarnya adalah benda?” (hal. 1056). Mengacu pada suatu ‘dilema’, ia menyatakan bahwa hakim “harus mengakui kompleksitasnya dan menghadapinya” (hal. 1059).

Selanjutnya Fahey menegaskan bahwa jawaban dari pertanyaan apakah suatu mahluk hidup memiliki ‘hak atas kebebasan yang dilindungi oleh surat perintah *habeas corpus* dari pengadilan’

akan bergantung pada penilaian kita terhadap sifat intrinsik simpanse sebagai suatu spesies. Catatan yang telah ada sebelumnya mengenai mosi untuk memperoleh izin naik banding mengandung bukti yang tidak dapat dibantah, dalam bentuk surat pernyataan sumpah dari para ahli primata terkemuka, yang menunjukkan bahwa simpanse memiliki kemampuan berpikir yang tinggi, termasuk dapat mengingat masa lalu dan merencanakan masa depan, memiliki kapasitas kesadaran dan pengendalian diri, serta kemampuan untuk berkomunikasi melalui bahasa isyarat. Simpanse dapat membuat alat untuk menangkap serangga; mengenali dirinya sendiri di hadapan cermin, foto, dan gambar televisi; meniru individu lain; menunjukkan kepedulian dan kesedihannya ketika anggota komunitasnya mati; dan bah-

kan menunjukkan rasa humor. Selain itu, filsuf amici yang memiliki keahlian di bidang etika hewan dan bidang-bidang terkait menarik perhatian kami pada bukti terbaru bahwa simpanse menunjukkan kememandirannya dengan bertindak sesuai informasi yang ada dan tujuan yang diciptakannya sendiri, yang bebas dari berbagai pengaruh yang bersifat mengendalikan (*NhRP ex rel. Tommy v. Lavery*, 2018, hal. 1057–8).

Kemudian, Fahey mengecam departemen pertama dan keempat dalam kasus Tommy dan Kiko karena secara keliru bersikeras bahwa NhRP, dalam kata-kata divisi banding, “tidak menentang legalitas pengurangan simpanse, tetapi hanya berupaya memindahkan simpanse ke fasilitas yang berbeda” (*NhRP ex rel. Tommy v. Lavery*, 2018, hal. 1058). Fahey menyimpulkan bahwa:

dalam selang waktu sejak kami pertama kali menolak izin untuk NhRP [...], saya selalu bertanya apakah ini adalah keputusan yang tepat [...]. Saya terus mempertanyakan apakah Pengadilan ini benar karena menolak izin ini pada awalnya. Persoalan terkait apakah hewan nonmanusia memiliki hak asasi atas kebebasan yang dilindungi oleh surat perintah *habeas corpus* dari pengadilan merupakan hal yang sangat serius dan luas jangkauannya. Surat ini menjelaskan tentang hubungan kita dengan semua kehidupan di sekitar kita. Pada akhirnya, kita tidak dapat mengabaikannya. Walaupun dapat disangkal bahwa simpanse bukan merupakan suatu ‘pribadi’, tidak ada keraguan bahwa simpanse bukanlah sekadar benda (*NhRP ex rel. Tommy v. Lavery*, 2018, hal. 1059).

Kejadian luar biasa kedua terjadi satu bulan kemudian. Departemen keempat, yang menolak kasus pertama Kiko pada tahun 2014, dihadapkan dengan seorang terdakwa kriminal yang dihukum karena merusak mobil yang dimiliki oleh penjual mobil. Undang-undang kejahatan pidana menganggapnya sebagai kejahatan karena merusak properti seorang ‘pribadi’ dan terdakwa membantah bahwa hanya manusia yang dapat dianggap sebagai seorang ‘pribadi’. Dengan menjunjung tinggi hukum pidana, pengadilan tersebut mengutip dua kasus yang dibahas di atas. Salah satu

kasus memperjelas bahwa ‘manusia’ dan ‘pribadi’ bukanlah merupakan sinonim dan kepribadian “bukan sekadar masalah penyesuaian biologis ataupun ‘alami’” (*Byrn v. NYCHHC*, 1972, hal. 201). Kasus lainnya yaitu Kiko, yang saat ini dikutip oleh pengadilan tersebut untuk mendukung dalil yang menyebutkan bahwa “*sudah jamak diketahui* bahwa kepribadian dapat dan kadang kala melekat pada entitas nonmanusia seperti perusahaan atau *hewan*” (*People v. Graves*, 2018, hal. 617, penekanan ditambahkan).

Memperluas Kampanye Hukum AS untuk Dapat Mengikutsertakan Gajah

Pada bulan Oktober 2018, dengan didukung surat pernyataan sumpah yang diajukan oleh peneliti gajah terkenal yaitu Lucy Bates, Richard Byrne, Karen McComb, Cynthia Moss, dan Joyce Poole, yang membuktikan bahwa gajah, seperti halnya simpanse, adalah makhluk yang sangat kompleks dan mandiri secara kognitif, NhRP berupaya memperoleh surat perintah *habeas corpus* atas nama seekor gajah yaitu Happy, yang telah dikurung di Kebun Binatang Bronx selama puluhan tahun (Bates, 2017; Bryne, 2016; McComb, 2016; Moss, 2017; NhRP, tanpa tahun-a; Poole, 2016, 2018).

Di New York, surat perintah untuk kasus *habeas corpus* dapat diajukan di mahkamah agung mana pun di negara bagian ini. NhRP mengajukan kasusnya di Albion (wilayah yang berada dekat dengan Air Terjun Niagara) karena bandingnya diterima oleh departemen keempat, yang relatif terbuka terhadap garis argumentasi NhRP. Sebulan kemudian, pengadilan tersebut memberikan surat perintah kedua berdasarkan penetapan *habeas corpus* atas nama seekor hewan nonmanusia di Negara Bagian New York dan surat perintah pertama atas nama seekor gajah (Mahkamah Agung Negara Bagian New York, 2018). Beberapa bulan berikutnya, atas keberatan NhRP, pengadilan memindahkan kasus tersebut ke Mahkamah Agung Bronx.

Pada tanggal 18 Februari 2020, setelah mendengar tiga jam argumentasi selama tiga hari, Hakim Mahkamah Agung Bronx yaitu

Alison Tuitt menolak klaim Kebun Binatang Bronx bahwa “Happy merasa senang” di Kebun Binatang Bronx dan sebaliknya menemukan bahwa “argumen yang diajukan oleh NhRP bersifat sangat persuasif, yakni untuk memindahkan Happy dari tempat pamerannya yang soliter dan tersendiri seluas satu are di Kebun Binatang Bronx ke sebuah suaka gajah”. Hakim Tuitt juga menganggap bahwa Happy adalah “seekor hewan luar biasa dengan kemampuan berpikir yang kompleks dan makhluk hidup cerdas dengan kemampuan analitis canggih yang menyerupai manusia”. Hakim Eugene Fahey menyatakan bahwa ia memercayai bahwa simpanse cenderung merupakan suatu pribadi hukum dan pastinya bukan merupakan sebuah benda, dan menuliskan bahwa Happy “lebih dari sekadar benda atau properti hukum” dan “merupakan makhluk hidup yang cerdas dan mandiri yang harus diperlakukan dengan hormat, dan dapat memiliki hak atas kebebasan” (Nonhuman Rights, 2020). Namun demikian, Hakim Tuitt ‘dengan menyesal’ menyatakan bahwa ia tidak dapat memerintahkan agar Happy dapat dilepas ke sebuah suaka karena ia merasa terikat dengan keputusan departemen pertama, yang “menyebutkan bahwa hewan bukan merupakan ‘pribadi’ yang memiliki hak dan berhak mendapatkan perlindungan dari surat perintah *habeas corpus*” (*NhRP ex rel. Tommy v. Lavery*, 2017).

Sementara itu, pada bulan November 2017, NhRP (dengan didukung surat pernyataan sumpah yang diajukan oleh para ahli gajah terbaik yang sama dengan kasus Happy) berupaya memperoleh surat perintah *habeas corpus* atas nama tiga gajah, yaitu Beulah, Karen, dan Minnie, yang selama puluhan tahun dipaksa tampil dalam sirkus keliling di Connecticut (NhRP, tanpa tahun-a). Berdasarkan hukum di negara bagian tersebut, pengadilan diharuskan mengeluarkan surat perintah *habeas corpus* kecuali jika tidak memiliki yurisdiksi atau gugatan tersebut nyata terbukti tidak memiliki dasar yang jelas (Nonhuman Rights, 2018). Pengadilan menolak memberikan surat perintah *habeas corpus* untuk kedua alasan tersebut. Dengan mengabaikan *common law* yang berlaku selama berabad-abad, yang memperbolehkan orang tak dikenal berupaya memperoleh surat perintah *habeas corpus* dari pengadilan atas nama individu yang dikurung oleh pihak swasta, pengadi-



lan tersebut mengatakan bahwa NhRP tidak memiliki kedudukan hukum yang disyaratkan karena NhRP sebelumnya tidak memiliki hubungan dengan gajah yang berada dalam kurungan tersebut dan NhRP tidak menyatakan bahwa hubungan yang telah ada sebelumnya tidak diperlukan. Pengadilan tersebut juga mengatakan bahwa kasus ini “nyata tidak memiliki dasar yang jelas secara hukum” mengingat tidak ada yang pernah mengajukan kasus semacam ini sebelumnya. Oleh karena itu, NhRP mencampuradukkan sesuatu yang ‘baru’ dengan yang ‘tidak memiliki dasar yang jelas’, dengan mengabaikan fakta bahwa setiap aturan hukum *common law* yang baru juga harus dimintakan sebelumnya (Choplin, 2017; NhRP, tanpa tahun-a).

Saat dilakukan banding pada bulan Agustus 2019, Pengadilan Banding Negara Bagian Connecticut mengesahkan putusan pengadilan yang lebih rendah, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Disebutkan bahwa NhRP tidak memiliki kedudukan bukan karena NhRP

sebelumnya tidak memiliki hubungan dengan gajah tersebut, tetapi karena gajah bukan merupakan pribadi dan tidak memiliki kapasitas untuk tanggung jawab yang diperlukan dalam membentuk hubungan seperti ini (*NhRP v. R. W. Commerford and Sons, Inc.*, 2019). Oleh karena NhRP tidak menerima pemberitahuan bahwa putusan Pengadilan Banding akan menimbulkan persoalan semacam ini, maka NhRP pun tidak cukup memberikan pengarahannya kepada pengadilan atau memperdebatkan kasus tersebut. Pada saat proses banding dilakukan, Karen pun mati dan dua bulan kemudian Beulah juga mati.

Selama menunggu banding, NhRP berupaya memperoleh surat perintah *habeas corpus* kedua dari pengadilan atas nama ketiga gajah yang sama, kali ini untuk membuktikan bahwa hubungan yang telah ada sebelumnya dengan gajah tidak diperlukan. Pengadilan yang lebih rendah tersebut menolak kasus kedua ini dengan alasan kasus ini secara fun-

Foto: Pada tahun 2017, NhRP mengajukan kasus tiga gajah, yaitu Beulah, Karen, dan Minnie, ke pengadilan. Kasus Minnie terus ditangani, tetapi kasus Beulah dan Karen dihentikan karena keduanya telah mati. © Gigi Glendinning

damental tidak berbeda dari kasus pertama yang diajukan oleh NhRP. NhRP mengajukan banding atas keputusan itu, dan berpendapat bahwa kesempatan yang dibutuhkan untuk sepenuhnya mengajukan tuntutan secara adil pada kasus pertama belum diberikan. Hanya setelah NhRP menyampaikan keterangan singkatnya pada kasus kedua, maka keputusan tersebut diberikan pada kasus pertama.

Pada bulan Oktober 2019, NhRP meminta izin kepada Pengadilan Banding untuk menyampaikan keterangan singkat pelengkap untuk kasus kedua guna memengaruhi pemikiran keputusan pengadilan pada kasus pertama. Izin ini diberikan dan NhRP menyampaikan keterangan singkat pelengkap pada bulan November 2019. Akan tetapi, keputusan terhadap kasus ini masih ditunda.

Hingga tahun 2013, tidak ada pengadilan AS yang pernah diberikan klaim bahwa hewan nonmanusia dapat saja merupakan suatu pribadi dengan kapasitas untuk memiliki hak legal fundamental sebagai bagian dari kampanye litigasi strategis berkelanjutan jangka panjang yang berfokus pada upaya memperoleh individualitas dan hak-hak untuk hewan nonmanusia. Pada tahun tersebut, NhRP memulai kampanye semacam ini untuk menjamin individualitas dan hak legal fundamental tertentu (pertama untuk simpanse dan kemudian untuk gajah) di New York dan setelah itu di Connecticut. NhRP berniat mengajukan kasus selanjutnya di California dan Colorado pada tahun 2020. Kampanye ini mulai berhasil dan NhRP hendak mengubah hubungan legal antara manusia dan hewan lain, baik yang berada dalam kurungan maupun di alam liar.

Jalur Internasional untuk Memperoleh “Kepribadian Hukum”: Di Luar Sistem Hukum *Common Law*

Di Amerika Serikat, NhRP berupaya memanfaatkan sistem hukum *common law*, di mana pengadilan dapat membuat undang-undang baru jika tidak ada undang-undang sebelumnya (Garner, 2014). Sebagai contoh, jika suatu pengadilan memberlakukan surat perintah *habeas corpus* atas nama hewan nonmanusia, keputu-

sannya akan menetapkan sebuah preseden baru untuk mempertimbangkan pengajuan permohonan selanjutnya atas nama hewan nonmanusia lainnya. Walaupun dapat menjadi suatu kemenangan bagi gerakan untuk memperoleh individualitas, bisa dibayangkan hal ini sulit untuk dipertahankan, mengingat bobot dan cakupan preseden semacam ini dalam sistem hukum *common law* akan tampak jelas bagi hakim.

Sebaliknya, sistem hukum *common law* memberikan lebih banyak tantangan yang berbeda. Dalam yurisdiksi ini, pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk bertindak di luar prinsip inti yang telah ada dan dikodifikasikan (Garner, 2014). Akibatnya, jika pengadilan sipil hanya mengakui ‘manusia’ dan ‘properti’, maka tidak ada mekanisme hukum untuk mengakui sesuatu di antara keduanya. Kasus seperti ini terjadi di Prancis, di mana (berdasarkan hukum perdata Napoleon tahun 1804) ‘hewan’ memiliki status yang sama dengan ‘furnitur’, dan oleh karenanya memiliki hak legal yang sama dengan sebuah kursi (Parlemen Prancis, 1804, pasal 528). Baru pada bulan Februari 2015, Prancis akhirnya mengakui bahwa hewan nonmanusia yang tidak liar sebagai ‘mahluk hidup yang sensitif’ (Parlemen Prancis, 2015, Pasal 2). Dilaporkan bahwa ini adalah pertama kalinya peraturan nasional membedakan hewan nonmanusia dari properti (Forte, 2015, hal. 4).

Mematahkan Hukum Perdata bagi Sandra

Keputusan Prancis akan segera memberitahukan tentang putusan hakim Argentina. Pada bulan November 2014, atas nama Sandra, satu individu orang utan di Kebun Binatang Palermo di Buenos Aires, Association of Officials and Attorneys for the Rights of Animals (AFADA) mendesak diberlakukannya surat perintah *habeas corpus* dari pengadilan terhadap pemerintah kota dan kebun binatang. Meskipun dalam kasus ini AFADA kalah pada saat banding, pengadilan Federal Chamber of Criminal Cassation di Argentina mengakui bahwa Sandra memiliki hak terbatas dan mengembalikan kasus ini ke pengadilan kriminal yang lebih rendah untuk mengevaluasi dugaan kekejaman terhadap hewan (CCC, 2014). Gugatan hukum (*amparo action*) selan-

jutnya, yang merupakan pemulihan hukum luar biasa untuk perlindungan hak konstitusional, dipertimbangkan oleh Hakim Elena Amanda Liberatori, yang bersimpati terhadap keadaan buruk yang menimpa Sandra. Karena tidak dapat mengubah pengakuan hukumnya dalam hukum perdata, yang hanya mengakui 'orang' dan 'kepemilikan', Hakim Liberatori mengategorikan Sandra sebagai 'pribadi non-manusia', dengan menghargai anteseden dalam keputusan Prancis tahun 2015 (*AFADA v. GCBA sobre amparo*, 2015). Dengan melakukan hal tersebut, Hakim Liberatori memungkinkan Sandra diberikan hak baru di luar hak-hak yang diberikan berdasarkan ketetapan sipil. Ia mengatasi, bukan melanggar, hukum perdata Argentina.

Karena disampaikan sebagai bagian dari keputusan dalam sebuah persidangan pidana, kategorisasi dari Hakim Liberatori tidak memiliki efek mengikat pada status hukum Sandra. Namun demikian, hakim diberi wewenang tidak hanya untuk memerintahkan komite untuk menentukan hal apa saja yang dapat membentuk kondisi yang 'memadai' bagi Sandra, tetapi juga untuk mengatur agar pemerintah selalu menjamin keberlangsungan kondisi

tersebut (*AFADA v. GCBA sobre amparo*, 2015). Pada kenyataannya, kondisi yang 'memadai' tidak ditemukan baik di Argentina maupun di suaka alam Brazil tempat Sandra akan dipindahkan, sehingga Hakim Liberatori menolak pemindahan yang diusulkan (GAP, 2017). Selanjutnya, pengakuan Liberatori terhadap Sandra sebagai 'pribadi nonmanusia' dicabut oleh pengadilan banding pada tahun 2016. Para hakim tidak berlebihan dalam menetapkan bahwa Sandra *bukan* merupakan pribadi non-manusia, tetapi mereka menganggap status Sandra tidak relevan, terlepas dari "posisi yang dapat diadopsi dalam hal ini [...] tidak ada perselisihan dalam kasus ini mengenai apakah hewan ini harus dilindungi [dan] apakah penderitaannya harus dilarang oleh hukum" (*AFADA v. GCBA appeal*, 2016, hal. 1, 8).

Meskipun demikian, selama empat tahun, Sandra tetap berada dalam kondisi yang secara hukum 'tidak memadai' berdasarkan semua ketentuan hakim. Setelah penutupan Kebun Binatang Palermo pada tahun 2016, kondisi-kondisi ini bisa dibilang kurang baik dibandingkan tempat tinggalnya pada saat AFADA melakukan pengajuan (Fraundorfer, 2017). Oleh karena itu, ketidakjelasan status hukum

Foto: Pada usia 33 tahun, Sandra akhirnya dipindahkan ke Center for Great Apes di Wauchula, Florida. © Patti Ragan, Center for Great Apes



Sandra menimbulkan pertanyaan praktis bagi pihak lain yang berupaya memperoleh individualitas, terutama bagi mereka yang menuntut ‘pelepasan’ kera besar dalam kurungan. Pada bulan November 2019, pada usia 33 tahun, Sandra akhirnya dipindahkan ke Pusat Kera Besar di Wauchula, Florida (Shenoy, 2019).

Kasus Sandra Membuka Kesempatan untuk Cecilia

Walaupun AFADA tidak menjamin *habeas corpus* untuk Sandra, kasus ini membuka pintu bagi argumentasi hukum AFADA pada pengajuan kasus pengadilan berikutnya. Pada tahun 2016, pengacara AFADA mengajukan dan memenangkan *habeas corpus* untuk Cecilia, satu individu simpanse di Kebun Binatang Mendoza di Argentina. Dalam keputusan bersejarahnya, Hakim María Alejandra Mauricio menekankan bahwa pengakuan “kepribadian hukum” Cecilia tidak memberikannya hak asasi manusia. Saat berbicara dengan media, hakim memang mengklarifikasi bahwa ia tidak mengacu kepada ‘hak sipil yang diabadikan dalam Kode Sipil’ (Tello, 2016). Namun, hakim mengakui bahwa Cecilia memiliki status ‘di antara’ manusia dan benda, dan mengutip ‘hak khusus bagi spesiesnya: untuk berkembang, untuk hidup di habitat alaminya’ (*AFADA v. Mendoza Zoo and City*, 2016; Tello, 2016). Bagi Cecilia, suaka di Brazil yang menjadi tujuan pemindahan Sandra yang dibatalkan dianggap sebagai ‘habitat alami’, dan berdasarkan keputusan hakim, Cecilia segera dipindahkan ke suaka tersebut (*AFADA v. Mendoza Zoo and City*, 2016, hal. 44–5).

Perlu dicatat bahwa petisi AFADA maupun keputusan hakim tidak bertujuan menjamin ‘hak asasi manusia’ untuk Sandra. Dengan demikian, tujuan dari kasus-kasus tersebut berbeda secara fundamental dari tujuan NhRP. Kasus-kasus ini mungkin merupakan kompromi yang masuk akal.

Individualitas sebagai Jalan Mencapai Tujuan

Kode sipil juga menciptakan permasalahan baru di Austria pada bulan Februari 2007, saat suatu suaka yang dihuni oleh Hiasl, satu individu sim-

ppanse tangkapan dari alam liar yang menjadi subyek penelitian farmasi, menyatakan kebangkrutannya. Seorang pebisnis Austria menawarkan memberikan ‘jumlah uang banyak’ kepada Hiasl dan Asosiasi Melawan Pabrik Hewan (*Association Against Animal Factories*), yang dikenal dengan singkatan dalam bahasa Jerman yaitu VGT, dengan syarat bahwa presidennya, Martin Balluch, dapat mencapai suatu kesepakatan dengan Hiasl mengenai bagaimana dana tersebut dimanfaatkan. Karena Hiasl tidak dapat membuat kesepakatan, VGT mengajukan petisi kepada pengadilan negeri Mödling agar Balluch ditunjuk sebagai wali resmi Hiasl. Dalam hukum Austria, Hiasl wajib diakui sebagai suatu ‘pribadi’ (Balluch dan Theuer, 2007).

Mengingat dana ini bisa saja langsung didonasikan kepada VGT, ketentuan dibutuhkannya persetujuan dari Hiasl mengindikasikan bahwa sumbangan ini mungkin memiliki motif lain, seperti mendorong petisi untuk memperoleh “kepribadian hukum.” Sebagaimana dicatat oleh Fraundorfer (2017), dan kemudian diakui oleh para pengaju petisi, kepribadian ini juga dapat membuka jalan bagi Hiasl untuk menuntut perusahaan farmasi yang bertanggung jawab atas penangkapannya dari alam liar pada tahun 1982, saat Hiasl masih bayi, dan memindahkannya ke sebuah laboratorium dan kemudian ke ‘ruang bawah tanah tanpa jendela’ (Balluch dan Theuer, 2007). Akan tetapi, Eberhart Theuer, pengacara VGT, berargumentasi bahwa petisi ini bukan merupakan suatu jalan akhir, “Di sini kami tidak bicara tentang hak memilih”. Sebaliknya, petisi ini mengupayakan pengakuan hak legal yang lebih dasar, yaitu ‘hak atas kehidupan, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas kebebasan dalam kondisi tertentu’ (AP, 2007).

Pada dua persidangan pertama, Hakim Barbara Breit menyampaikan rasa frustrasinya karena Hiasl tidak memiliki dokumen yang membuktikan identitasnya. Setelah kesaksian yang diberikan manusia atas nama Hiasl untuk menjelaskan asal usulnya, pada persidangan kedua Breit memutuskan bahwa wali tidak dapat ditunjuk karena Hiasl tidak mengalami gangguan mental atau berada dalam bahaya. Sebagai alasan dari keputusannya, Hakim Breit juga menyebutkan potensi persepsi publik yang dapat saja menganggap bahwa manusia yang ditunjuk oleh pengadilan untuk menjadi

“Dalam beberapa kewenangan hukum *civil law*, pertimbangan mengenai ‘kepribadian’ bagi kera besar membuahkan pengakuan yang lebih tegas atas hak asasi kera besar, yang menunjukkan pentingnya pelaksanaan kampanye hukum.”

wali adalah nonmanusia (Balluch dan Theuer, 2007). Pengajuan banding VGT ditolak pengadilan negeri pada bulan Mei 2007 atas dasar bahwa hanya wali, yang tidak dapat ditunjuk, yang dapat mengajukan banding. Mengacu pada kode sipil Austria, tiga pengadilan lainnya menolak pengajuan banding lain dengan alasan yang sama: pengadilan negeri melakukan ini pada bulan Mei 2007, pengadilan negeri provinsi di Wiener Neustadt pada bulan September 2007, dan Mahkamah Agung di Wina pada bulan Januari 2007 (AP, 2008; Balluch dan Theuer, 2007). Pada semua kasus ini, interpretasi teknis kode sipil Austria tidak menyebutkan ketentuan untuk menjawab pertanyaan inti, yaitu apakah Hiasl, sebagai pengaju banding, berhak mendapatkan status hukum apa pun (Fasel *et al.*, 2016).

Tinjauan terhadap catatan kasus Hiasl menyebutkan bahwa Hakim Breit meninggalkan pertanyaan apakah Hiasl memiliki status sebagai pribadi karena “dalam semua keputusan dan korespondensinya, Hakim terus menerus menuliskan Hiasl sebagai suatu pribadi,” (Balluch dan Theuer, 2007, hal. 339). Memang tinjauan ulang dan reportase media mengusulkan bahwa Breit bersimpati dengan argumen ini, namun terikat pada kode sipil, tanpa potensi menetapkan preseden/yurisprudensi *common law* (Balluch dan Theuer, 2007).

Secara historis, kode sipil menjamin ‘kepribadian hukum’, atau setidaknya status yang setara, saat hewan nonmanusia menjadi tergugat. Pengadilan pidana hewan peternakan dan domestik banyak diadakan di abad pertengahan. Dalam salah satu kasus, seekor babi diadili dan divonis atas kasus pembunuhan di Prancis pada tahun 1266, dan kemudian dihukum mati dengan cara dibakar (Evans, 1906). Di Swiss pada tahun 1474, seekor ayam diadili dalam persidangan ‘serius’ dan dibakar atas kejahatannya yang ‘keji’ yaitu bertelur (Walter, 1984). Hal yang berubah adalah bahwa kini hewan nonmanusia menjadi penggugat, bukan tergugat, seperti pada kasus individualitas kera besar. Akan tetapi, dalam kode sipil, preseden ini tidak berlaku. Sebagaimana ditunjukkan oleh Hakim Liberatori di Argentina, pencapaian individualitas dalam persidangan perdata akan membutuhkan solusi kreatif dalam cakupan parameter hukum yang dikodifikasi.

Tidak Semua Kasus Memajukan Perjuangan

Tidak semua kasus dalam *civil law* mencapai titik sejauh kasus Sandra atau Cecilia. Pada bulan Oktober 2005, beberapa organisasi kesejahteraan hewan mengajukan *habeas corpus* atas nama Suiça, simpanse betina di Kebun Binatang Salvador di Bahia, Brazil, agar dapat dipindahkan ke Suaka Kera Besar Sorocaba di São Paulo. Hakim Edmundo Cruz mengakui bahwa dalam hukum, ia dapat segera menghentikan persidangan, namun memutuskan memperbolehkan perdebatan ‘untuk mendorong diskusi mengenai kejadian ini’ (Cruz, 2006, hal. 282). Hakim Cruz bahkan diam-diam mengunjungi kebun binatang sebagai bagian dari risetnya sendiri, di mana ia secara panjang lebar mendokumentasikan opininya dengan tujuan ‘memantik pakar hukum di seluruh negara’ untuk menanggapi kontroversi inti, yaitu “Apakah suatu individu primata dapat disamakan dengan seorang manusia atau tidak?” (hal. 284). Dalam kasus ini, klaim *habeas corpus* tidak lagi berlaku dengan kematian mendadak Suiça pada bulan September 2005. Hakim Cruz, yang sebelumnya memberikan indikasi ambigu bahwa ia akan membuat keputusan yang berpihak pada Suiça, dibebaskan dari kewajibannya untuk membuat suatu keputusan (Cruz, 2006).

Karena Hakim Cruz tidak dapat menetapkan preseden dalam *civil law*, maka dalam dua kali kesempatan hakim lokal mengambil sudut pandang berseberangan dalam menetapkan kasus *habeas corpus* untuk Jimmy, simpanse di kebun binatang swasta di Niterói, Brazil. Kasus Jimmy langsung ditolak dengan dasar bahwa simpanse tidak berhak mendapatkan hak atas “kepribadian hukum”. Di waktu yang bersamaan, sebelum banding federal dapat diajukan, kebun binatang tersebut ditutup karena kondisinya yang buruk dan Jimmy pun dipindahkan ke Suaka Sorocaba (Fraundorfer, 2017).

Melampaui Kasus Individu: Hak di Tingkat Taksonomi

Karena NhRP ingin menetapkan preseden *common law* di Amerika Serikat, maka kasus-kasusnya berfokus pada individu tertentu dan

“Walaupun pemerintah telah menghentikan seluruh penggunaan simpanse pada bulan November 2015, secara teknis penelitian invasif pada spesies ini masih legal di AS.”

surat perintah *habeas corpus* dari pengadilan atas nama individu hewan tersebut. Pendekatan ini didasari pada pemahaman bahwa, dalam hukum AS, pengakuan atas hak yang lebih luas di tingkat taksonomi berada jauh di belakang negara-negara lain. Pada tahun 1960, atas perintah Kongres, pemerintah AS lah yang pertama kali mengizinkan penangkapan dan impor-tasi simpanse liar dalam skala besar untuk riset invasif (Grimm, 2017). Pada tahun 1999, setelah penangkaran intensif pascaepidemi AIDS, jumlah simpanse meningkat hingga mencapai angka tertinggi sepanjang masa yaitu 1.500 individu, di mana sebagian besar dikurung dalam laboratorium yang dioperasikan atau didanai pemerintah (US Congress, 2000). Walaupun pemerintah telah menghentikan seluruh penggunaan simpanse pada bulan November 2015, secara teknis penelitian invasif pada spesies ini masih legal di AS. Namun sejak US Fish and Wildlife Service menetapkan simpanse dalam kurungan sebagai satwa terancam punah pada bulan Juni 2015, maka dibutuhkan izin untuk melakukan penelitian seperti yang disebutkan. Akan tetapi, tidak diketahui adanya peneliti yang mengajukan pendaftaran izin tersebut (Collins, 2015).

Suatu keputusan yang berlaku pada bulan April 2018 benar-benar mengukur seberapa lambatnya hukum AS dalam memberikan perlindungan kepada kera besar (US Fish and Wildlife Service, 2018). Keputusan yang dibuat oleh US Fish and Wildlife Service tersebut mengakui adanya dua spesies orang utan. Keputusan ini dibuat 22 tahun setelah kedua spesies tersebut secara resmi diterima oleh masyarakat ilmiah, dan enam bulan setelah spesies ketiga dideskripsikan dalam publikasi ilmiah (Nater *et al.*, 2017; Xu dan Arnason, 1996). Dengan demikian, tantangan yang dihadapi NHRP cukup besar. Jika undang-undang AS lambat dalam mengakui spesies, dan jika penelitian invasif pada simpanse secara teknis masih dianggap legal, apakah mungkin legislasi AS akan memberikan hak spesifik bagi individu tertentu?

Sebaliknya, banyak negara lain yang semakin mendekati pengakuan atas “kepribadian hukum”. Dengan pengecualian Gabon, maka pada tahun 2008 Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menggunakan

simpanse untuk riset invasif (Knight, 2008). Pada saat itu, sejumlah negara telah menghentikan atau melarang penelitian invasif yang menggunakan semua takson kera besar, baik melalui hukum ataupun kebijakan. Inggris secara khusus melarang penggunaan kera besar dalam riset invasif pada tahun 1997 (dan telah menghentikan penggunaannya pada tahun 1986); Selandia Baru pada tahun 1999; Australia dan Swedia pada tahun 2003; Belanda pada tahun 2004; Austria dan Jepang pada tahun 2006; dan Jerman pada tahun 2013 (setelah berhenti menggunakannya pada tahun 1992) (Federal Ministry of Food and Agriculture, tanpa tahun; Knight, 2008). Di antara negara-negara yang memberlakukan larangan ini, Austria adalah satu-satunya negara yang secara eksplisit melarang percobaan pada owa (Knight, 2008). Di beberapa negara, diberlakukan pengecualian untuk riset perilaku noninvasif, atau riset invasif yang ditujukan demi manfaat individu terkait. Knight (2008) menyampaikan rangkuman peraturan yang bermanfaat. Pada tahun 2010, Uni Eropa memperkenalkan larangan di seluruh Uni Eropa, yang mengikuti deklarasi parlemen yang sebelumnya ditan-datangani oleh 433 dari 786 anggota Parlemen Eropa (ADI, 2007; EU, 2010). Jumlah penandatanganan ini merupakan ketiga terbanyak yang tercatat untuk deklarasi apa pun sejak tahun 2000 (ADI, 2007). Prosedur legislatif tunggal berdasarkan keputusan bersama ini telah memajukan hak-hak di seluruh negara anggota Uni Eropa, termasuk di negara yang sebelumnya tidak memiliki legislasi domestik mengenai penggunaan kera besar dalam riset (EU, 2010).

Beberapa negara lain dapat dikatakan telah mengambil langkah lebih jauh. Sejak tahun 1999, UU Kesejahteraan Satwa Selandia Baru melarang penggunaan ‘hominid nonmanusia’ dalam ‘penelitian, pengujian, atau pengajaran’ apa pun yang dianggap bukan merupakan kepentingan terbaik individu atau spesies tersebut, yang membatasi penggunaannya dalam kondisi di mana kerugian yang mungkin terjadi tidak lebih besar dari manfaat keseluruhannya (Brosnahan, 2000, hal. 190; Parlemen Selandia Baru, 1999; lih. Bagian II dalam bab ini). Pada tahun 2008, parlemen

Spanyol menyetujui resolusi untuk memberikan sejumlah ‘hak berdasarkan undang-undang’ kepada kera besar, mempidanakan pembunuhannya, dan melarang penggunaannya dalam percobaan medis, hiburan, dan sebagian besar kegiatan untuk keuntungan, kecuali kebun binatang (Nature, 2008). Resolusi ini berkembang dari legislasi serupa yang ditetapkan di Kepulauan Balears, suatu wilayah otonom di Spanyol, pada tahun 2007 (Knight, 2008).

Akan tetapi, keberhasilan dan nilai dari legislasi tersebut harus dinilai dengan sesuai. Hanya 28 simpanse dan enam orangutan yang tinggal di Selandia Baru pada saat UU Kesejahteraan Satwa diterbitkan, dan tidak ada di antaranya yang digunakan untuk riset, pengujian, atau pengajaran, dan tidak ada usulan untuk melakukannya (Elder, 2019). Selain itu, UU ini tidak melarang penggunaannya untuk eksploitasi komersial. Hanya dua bulan setelah UU berlaku, dua individu simpanse dijual kepada sirkus Pacific Island, dan salah satunya mati dalam kandang pemindahannya setelah terjadi sejumlah penundaan yang tidak terduga (Brosnahan, 2000). Walaupun tidak diketahui jumlah pasti kera besar satu dekade yang lalu di Spanyol dan Kepulauan Balears, namun diketahui bahwa jumlahnya hanya sedikit dibandingkan jumlah kera besar di laboratorium biomedis di AS.

Status Kera dalam Kurungan: Data Statistik Terkini

Meskipun dibutuhkan data mengenai jumlah, lokasi, asal, dan status kesejahteraan kera dalam kurungan untuk memberitahukan kebijakan apa saja yang efektif, informasi demikian tidak bisa diperoleh dari semua bentuk pemeliharaan dan perawatan. Beberapa data rinci tersedia dalam bentuk buku daftar silsilah (*studbook*), pelaporan sukarela oleh lembaga, seperti pengguna Sistem Pengelolaan Informasi Zoologi (*Zoological Information Management System/ ZIMS*) Species360 (Species360, tanpa tahun); Jaringan Informasi Kera Besar Jepang (GAIN, tanpa tahun); dan catatan terbuka pemerintah. Pada kasus lainnya, fasilitas kurungan secara sukarela menerbitkan data dalam laporan atau menyampaikannya pada konferensi. Pada umumnya, data mengenai bentuk kurungan yang kurang diatur atau ilegal masih sedikit. Estimasi dari kegiatan terkait, seperti penegakan hukum, upaya proksi, pemodelan statistik, dan perkembangan teknologi lainnya turut berkontribusi pada basis pengetahuan, namun tidak dapat mengisi semua kekurangan (Clough dan May, 2018; Stiles *et al.*, 2013). Kurangnya data sangat parah khususnya di negara habitat dan sekelilingnya, di mana kurungan lebih erat kaitannya dengan pembunuhan.

Foto: Mengingat kebutuhan dan kemampuan sosialnya, kera dalam kurungan dapat menyesuaikan diri lebih baik dengan lingkungannya jika mereka menjadi bagian dari kelompok yang terdiri atas individu-individu yang cocok dengannya. Gorilla Rehabilitation and Conservation Education Center. © GRACE



Jumlah dan status kera yang berada dalam kurungan bervariasi berdasarkan faktor pendorong intrinsik dan ekstrinsik. Regulasi terus bergeser dalam sejumlah cara yang memengaruhi bagaimana kera dipelihara dan dimanfaatkan dalam kurungan, serta risiko yang dihadapi di habitat alamnya. Status kesejahteraan kera yang berada dalam kurungan bervariasi sebagai fungsi dari jenis kondisi kurungannya dan sifat biologis dari individu tersebut. Pada beberapa kasus, demografi juga dapat berpengaruh. Sebagai contoh, individu tua dan renta mengalami risiko morbiditas dan mortalitas lebih tinggi dan mungkin membutuhkan kandang berbeda, atau perawatan tambahan atau khusus. Serangkaian faktor eksternal lainnya, seperti kejahatan, korupsi, dan kesenjangan pendapatan, dapat memberikan dampak tidak langsung (Clough dan May, 2018; Morris, 2013).

Dalam praktiknya, penggunaan penghitungan dan hasil berbasis hewan untuk menilai kesejahteraan dan kualitas hidup individu dan kelompok merupakan pendekatan yang paling kuat (Hemsworth *et al.*, 2015; Mellor, Hunt, dan Gusset, 2015; Mellor dan Webster, 2014; OIE, 2019). Untuk perbandingan lebih luas, diguna-

kan pengukuran seragam atau yang diselaraskan. Salah satu pendekatan ini adalah Indeks Perlindungan Hewan (*Animal Protection Index/API*), pengukuran nasional yang menanggapi faktor risiko dan perlindungan (WAP, tanpa tahun-a). API menilai indikator dalam lima kategori yang penting bagi status perlindungan dan kesejahteraan hewan, yaitu pengakuan, tata kelola, standar, edukasi, dan kesadartahuan. Nilai-nilai tersebut digabungkan dalam sebuah nilai keseluruhan API dari A sampai G, di mana A merupakan nilai tertinggi (WAP, tanpa tahun-b). Bagian ini melaporkan nilai API beserta data lain, jika ada.

Kera dalam Kurungan di Wilayah Terpilih

Eropa

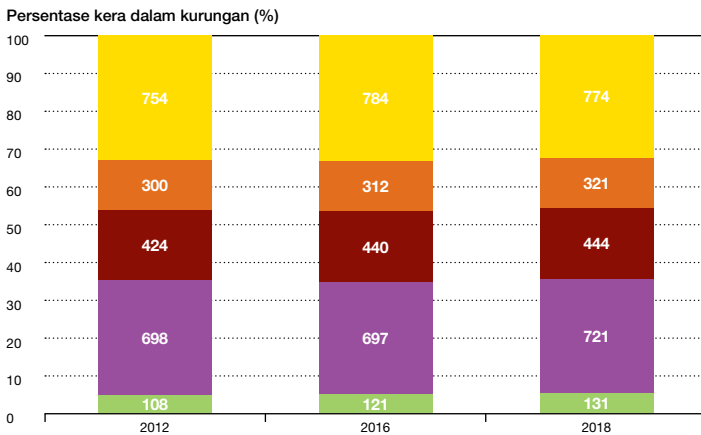
Secara keseluruhan, rangkaian data untuk Eropa tahun 2018 mencakup informasi mengenai 2.391 kera di 226 lembaga anggota, yang menyimpan 1 hingga 54 kera di setiap lokasi (lih. Gambar 8.1). Jika dibandingkan dengan data yang dilaporkan dalam volume *Negara Kera* sebelumnya, peningkatan total jumlah individu dalam kurungan berkisar pada jumlah 100 ekor, atau kurang dari 2% (Durham, 2018). Pada tahun 2018, owa merupakan takson yang paling banyak dalam sampel, kemudian diikuti dengan simpanse, gorila, orang utan, dan bonobo. Jumlah kera soliter dalam sampel cukup sedikit, yaitu 23 kera, atau kurang dari 1% dari jumlah total. Karena kebutuhan sosial dan kemampuannya, kera dalam kurungan dapat menyesuaikan diri lebih baik dengan lingkungannya jika mereka menjadi bagian dari kelompok yang terdiri atas individu-individu yang cocok dengannya.

Nilai API untuk negara-negara Eropa dalam rangkaian data ini sangat bervariasi, dari B hingga F (lih. Tabel 8.1). Pada beberapa negara dengan nilai API tinggi, 'daftar putih' digunakan untuk menentukan spesies apa yang dapat dipelihara, dan tidak diketahui apakah kera termasuk dalam daftar ini (Durham dan Phillipson, 2014). Semakin banyak negara Eropa yang memiliki laran-

GAMBAR 8.1

Kera di Beberapa Kebun Binatang Eropa, berdasarkan Takson, pada tahun 2012, 2016, dan 2018

Kunci: ■ Bonobo ■ Simpanse ■ Gorila ■ Orang utan ■ Owa



Catatan: Angka-angka ini diambil dari data agregat yang disajikan dalam laporan pemeliharaan satwa yang dicatatkan pada Species360 di tahun 2018. Beberapa angka mungkin menunjukkan adanya satwa yang dipelihara dari tahun-tahun sebelumnya.

Sumber data: Durham (2015, Gambar 8.1; 2018, Gambar 8.3); Species360 (tanpa tahun)

TABEL 8.1**Nilai API untuk Beberapa Negara Eropa, tahun 2020**

Negara	Nilai API
Austria	B
Belarus	F
Denmark	B
Prancis	C
Jerman	C
Italia	C
Belanda	B
Polandia	C
Romania	D
Rusia	D
Spanyol	C
Swedia	B
Swiss	B
Turki	D
Ukraina	E
Inggris	B

Sumber: WAP (tanpa tahun-a)

gan eksplisit untuk sirkus dan pertunjukan serupa (ADI, tanpa tahun; Tyson, Draper, dan Turner, 2016). Di Jerman, pada awalnya pengadilan memerintahkan satu simpanse bernama Robby agar dipindahkan untuk tinggal dengan simpanse lain setelah pertunjukan langsungnya dalam suatu sirkus dihentikan, akan tetapi melalui banding, pemiliknya diizinkan untuk tetap memelihara Robby (BBC, 2018; Deutsche Welle, 2017).

Amerika Latin

Kebun binatang dan koleksi satwa pribadi telah dikelola di seluruh Amerika Latin selama puluhan tahun (Horta Duarte, 2017). Buruknya kesejahteraan satwa dalam kurungan menjadi kekhawatiran yang meluas di antara dokter hewan dan kelompok kesejahteraan satwa di wilayah ini. Mereka menyebutkan bahwa regulasi dan penegakan hukum

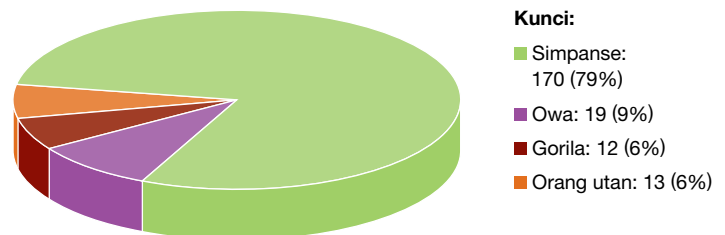
yang lemah merupakan hambatan utama menuju perbaikan (Huertas, Gallo, dan Galindo, 2014; Larkin, 2010). Akan tetapi di beberapa wilayah tertentu, upaya peningkatan perlindungan semakin mendapatkan momentum. Sebagai contoh, beberapa negara mengadopsi larangan sirkus dan pertunjukan, dan beberapa pengadilan sudah mendengar argumen tentang dan bahkan memberikan beberapa hak bagi individu kera, termasuk pemindahan ke suaka (ADI, 2019; Henao dan Calatrava, 2016; Román, 2015; Samuels, 2016; Shenoy, 2019; lih. Bagian I dalam bab ini).

Sejumlah suaka beroperasi di seluruh Amerika Latin, di mana sebagian besar kera dalam kurungan dipelihara dalam kebun binatang dan bentuk pameran lainnya. Di Brazil, empat suaka terkait Proyek Kera Besar dihuni oleh 76 ekor simpanse dan satu orangutan (J. Ramos, komunikasi pribadi, 2018). Dengan tidak adanya mandat pelaporan dan penegakan yang kuat, serta kurangnya angka resmi komprehensif jumlah kera di Amerika Latin, estimasi jumlah kera dalam kurungan di wilayah ini bergantung pada data yang dilaporkan secara sukarela dan wawancara langsung (lih. Gambar 8.2).

Nilai API untuk negara Amerika Latin dalam rangkaian data berkisar dari C di Meksiko hingga E untuk Venezuela (lih. Tabel 8.2).

GAMBAR 8.2

Estimasi Jumlah Kera dalam Kurungan di Amerika Latin, berdasarkan Takson, tahun 2018



Catatan: Beberapa angka diambil dari data agregat yang disajikan dalam laporan pemelihara satwa yang dicatatkan pada Species360 di tahun 2018, dan mungkin menunjukkan adanya satwa yang dipelihara dari tahun-tahun sebelumnya.

Sumber data: Species360 (tanpa tahun); komunikasi pribadi tahun 2018 dengan C. Alzola; H. Castelán; C. Fernandes Cipreste; L. Fernández; A. Gabriella Ioli; M.V. Josué Rángel; H. Khoshen; E. Padrón Ramos; J. Ramos; M. Rodríguez González; E.J. Sacasa; C. Silva; Zoológico Nacional del Parquem, Santiago, Chili

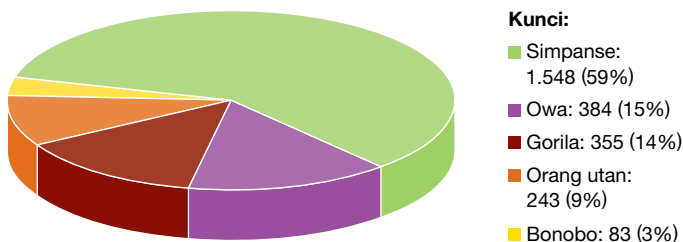
TABEL 8.2**Nilai API untuk beberapa negara Amerika Latin terpilih, 2020**

Negara	Nilai API
Argentina	E
Brasil	D
Chili	D
Kolombia	D
Meksico	C
Peru	D
Uruguay	D
Venezuela	E

Sumber: WAP (tanpa tahun, -a)

Amerika Serikat

Lebih dari 2.600 kera hidup dalam kurungan di Amerika Serikat, dengan simpanse dan owa dalam jumlah lebih banyak dibandingkan gorila dan orang utan (lih. Gambar 8.3). Jumlah keseluruhan untuk tahun 2018 menunjukkan sedikit perbedaan dibandingkan dengan jumlah yang dilaporkan pada laporan sebelumnya, dan hal ini mencerminkan usia hidup kera yang cukup panjang (Durham, 2018). Amerika Serikat mendapatkan nilai API yaitu D (WAP, tanpa tahun, -a).

GAMBAR 8.3**Jumlah Kera dalam Kurungan di Amerika Serikat berdasarkan Takson, 2018**

Catatan: Beberapa angka diambil dari data agregat yang disajikan dalam laporan pemelihara satwa yang dicatatkan pada Species360 di tahun 2018, dan mungkin menunjukkan adanya satwa yang dipelihara dari tahun-tahun sebelumnya.

Sumber data: Center for Great Apes (tanpa tahun); ChimpCARE (tanpa tahun); Durham (2015, gambar 8.3); Durham dan Phillipson (2014, tabel 10.6); Species360 (tanpa tahun); komunikasi pribadi tahun 2018 dengan B. Malinsky, A. Ott, B. Richards, A. Whitely, dan K. Zdrojewski; kunjungan penulis ke International Primate Protection League, South Carolina, 2018; tinjauan Bonobo Species Survival Plan (2018), Gorilla Species Survival Plan (2017), Orangutan Species Survival Plan (2017) oleh penulis

Sebagian besar kera yang disebutkan dalam rangkaian data ini dipelihara di kebun binatang. Akan tetapi, pemilahan data berdasarkan takson menunjukkan bahwa sebagian besar simpanse dan owa dipelihara dalam sistem pemeliharaan/perawatan lain. Untuk simpanse, batasan regulasi baru dan penting telah mengurangi jumlah individu di laboratorium dan bentuk kurungan lainnya di AS (Durham, 2015, 2018). Oleh karena itu, untuk pertama kalinya di AS, jumlah simpanse dalam suaka kini melebihi simpanse dalam sistem pemeliharaan/perawatan lainnya (lih. Tabel 8.3). Pada tahun 2018, pemerintah AS menerbitkan panduan mengenai proses pemindahan, yang akan melanjutkan pergeseran dari laboratorium menuju suaka (NIH, 2018). Sejumlah kecil suaka kera di AS yang tidak semuanya memiliki status akreditasi merawat simpanse dan menampung mulai dari dua individu hingga lebih dari 260 simpanse. Salah satu di antaranya adalah Center for Great Apes, yang juga merupakan satu-satunya suaka di AS yang menampung orang utan, termasuk 21 orang utan pada bulan Juli 2019 (Center for Great Apes, tanpa tahun).

Walaupun 384 owa dalam kurungan telah terhitung dalam data, sebagaimana disajikan pada Gambar 8.3, diperkirakan masih lebih banyak lagi owa yang tidak tercatat, sebagian besar sebagai hewan peliharaan, tetapi juga di pameran yang tidak terakreditasi atau kebun binatang liar. Hampir 300 ekor owa milik pribadi yang tercatat dalam volume pertama *Negara Kera* menjadi tidak dapat diakses dalam rangkaian data saat Departemen Pertanian AS (*US Department of Agriculture*) menetapkan batasan baru untuk akses pada data (Durham, 2018, hal. 257, kotak 8.3). Tidak hanya menunjukkan jumlah individu, catatan yang dirahasiakan ini mencakup rincian inspeksi UU Kesejahteraan Satwa dan pelanggaran (Brulliard, 2017). Kepentingan publik merupakan poin kunci dalam gugatan baru dan gugatan berjalan untuk mendapatkan kembali akses (ALDF, 2018; Durham, 2018; Wadman, 2017).

Asia Pasifik**Oseania**

Australia mendapatkan nilai D untuk API (WAP, tanpa tahun-a). Rencana Strategi Kesejahteraan Satwa dan Implementasi

TABEL 8.3**Jumlah Simpanse dalam Berbagai Sistem Pengurangan di Amerika Serikat, 2011–November 2018**

Bentuk kurungan	2011 ^a	2014 ^b	2016 ^c	2018 ^d	% perubahan 2011–18
Laboratorium biokimia	962	794	658	464	-52%
Suaka GFAS*	522	525	556	585	+12%
Kebun Binatang AZA**	261	258	259	236	-10%
Pameran***	106	196	111	192	+81%
Pedagang atau pemilik hewan peliharaan	60	52	37	61	+2%
Hiburan	20	18	13	10	-50%
Total	1.931	1.843	1.634	1.548	-20%

Catatan: * GFAS adalah singkatan dari Federasi Global Suaka Satwa (*Global Federation of Animal Sanctuaries*). **AZA adalah singkatan dari Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium (*Association of Zoos and Aquariums*). ***Pameran terdiri dari kebun binatang nonAZA dan fasilitas lain yang terbuka atau tidak terbuka untuk umum. Kategori ini mencakup kera dalam suaka yang tidak terakreditasi setidaknya pada beberapa periode pelaporan.

Sumber data: a) Durham dan Phillipson (2014, gambar 10.2); b) Durham (2015, tabel 8.4); c) Durham (2018, tabel 8.1); d) ChimpCARE (tanpa tahun)

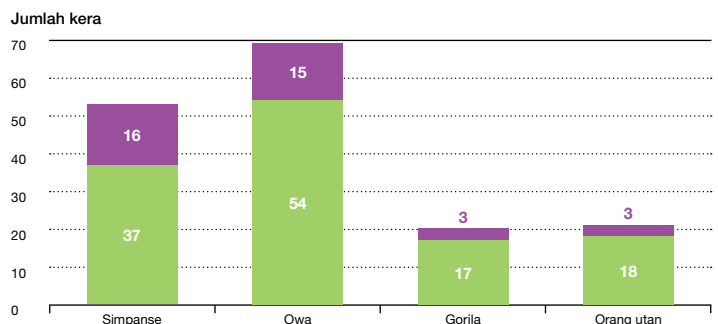
Nasionalnya, yang mencakup semua satwa hidup, disusun berdasarkan Strategi Kesejahteraan Satwa untuk Asia, Timur Jauh, dan Oseania (Australian Government, 2011; OIE, tanpa tahun; WAP, tanpa tahun-a). Hukum di tingkat wilayah dan negara bagian memberikan perlindungan lebih besar untuk satwa, termasuk dengan mengatur standar pameran dan pedoman mengenai rasa sakit, penderitaan, dan kesejahteraan positif (WAP, tanpa tahun-a). Australia adalah tempat tinggal populasi simpanse di kebun binatang yang paling banyak diteliti dan, hingga baru-baru ini, orang utan tertua dalam kurungan tinggal di kebun binatang di Perth (Hart, 2018; Littleton 2005).

Selandia Baru, yang memiliki nilai C untuk nilai API, merupakan salah satu negara yang mengadopsi peraturan tentang penggunaan kera dalam percobaan laboratorium (Knight, 2008; Taylor, 2001; WAP, tanpa tahun-a). UU Kesejahteraan Satwa Selandia Baru tahun 1999 pada umumnya membatasi penelitian pada 'hominid nonmanusia', yaitu kera besar. Dalam peraturan ini, pihak otoritas dapat menyetujui pendaftaran usulan penelitian kera besar hanya jika memenuhi kriteria etika yang ketat, menyusul tinjauan wajib oleh Dewan Penasihat Etika Hewan Nasional dan bukti bahwa penelitian merupakan kepentingan terbaik bagi kera terlibat atau spesiesnya, dan selama manfaat yang diperoleh tidak kurang dari potensi kerugian terhadap satwa tersebut (Parlemen Selandia

Baru, 1999; lih. Bagian I dalam bab ini). Ketentuan terakhir mencerminkan prinsip bioetika modern tentang kebaikan dan keadilan (Beauchamp, Ferdowsian, dan Gluck, 2014). Pada tahun 2013, suatu tinjauan peraturan mempertimbangkan bagaimana pengajuan pendaftaran pameran kera dan satwa lain ditangani. Proses ini dilakukan sebagai respons akan kekhawatiran yang mencakup keamanan dan kesejahteraan hewan (Environmental Protection Authority, 2013).

GAMBAR 8.4**Kera dalam Kurungan di Australia dan Selandia Baru, berdasarkan Takson, 2018**

Kunci: ■ Australia ■ Selandia Baru



Catatan: Beberapa angka diambil dari data agregat yang disajikan dalam laporan pemeliharaan satwa yang dicatatkan kepada Species360 di tahun 2018, dan data lainnya diperoleh dari media yang disebutkan di bawah ini. Beberapa angka mungkin menunjukkan adanya satwa yang dipelihara dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada bonobo yang dilaporkan.

Sumber data: Hart (2018); Johnston (2015); Lee (2013); Littleton (2005); Mager (2000); Pasley (2017); Species360 (tanpa tahun).

Kondisi keseluruhan kera yang berada dalam kurungan di wilayah Oseania cukup stabil karena jumlahnya yang sedikit dan adanya regulasi yang sudah cukup kuat. Catatan tentang kera hanya terdapat di kebun binatang dan taman margasatwa di Australia dan Selandia Baru. Mengingat sifat dan cakupan regulasi dan standar kebun binatang yang ada, hanya terdapat sedikit risiko kesejahteraan di luar risiko terkait penempatan dalam kurungan secara jangka panjang, dan beberapa kasus satwa kabur atau pemindahan berprofil tinggi (Hart, 2018; Johnston, 2015; Lee, 2013; Mager, 2000; Pasley, 2017). Gambar 8.4 menunjukkan jumlah kera untuk masing-masing takson di kebun binatang di Australia dan Selandia Baru.

Asia

Di Asia, kebun binatang memiliki banyak kera dalam kurungan. Tanpa menghitung Jepang, angka dalam basis data untuk tahun 2018 mengindikasikan bahwa terdapat 25 gorila, 436 owa, dan sekitar 220 simpanse serta 170 orang utan yang dipelihara di kebun binatang (Species360, tanpa tahun). Seperti yang disebutkan di awal bab ini dan dalam edisi *Negara Kera* sebelumnya, ketersediaan dan kualitas data jumlah kera dalam kurungan dan kesejahteraannya bervariasi di berbagai negara dan wilayah. Hal ini terjadi antara lain karena akses dan partisipasi yang tidak sama dalam basis data pelaporan dan keanggotaan. Suatu tinjauan menyeluruh mengidentifikasi 466 orang utan di kebun binatang di Asia, dan jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan angka yang dilaporkan di buku silsilah atau basis data (Banes *et al.*, 2018). Sebagaimana ditekankan oleh studi ini, persoalan dengan pengumpulan dan pembagian informasi dapat menjadi hambatan bagi kebun binatang, sebagaimana menjadi hambatan untuk tinjauan ini dan penelitian lainnya (Banes *et al.*, 2018; Durham dan Phillipson, 2014).

Data rinci untuk Jepang telah dilaporkan dalam volume *Negara Kera* sebelumnya. Data terkini menunjukkan bahwa populasi dalam kurungan di Jepang cukup statis (perubahan kurang dari 3% sejak tahun 2016), yaitu 6 bonobo, 31 simpanse, 21 gorila, 47 orang utan, dan 178 owa (Durham, 2018; GAIN, tanpa tahun; Species360, tanpa tahun). Di Jepang,

seperti halnya di negara lain yang mewajibkan pelaporan, cakupan data sangat unggul dan konsisten dalam berbagai sumber (Banes *et al.*, 2018; Durham, 2018; GAIN, tanpa tahun).

Selain itu, suaka di Asia menampung lebih dari 600 owa dan 1.200 orang utan (Durham, 2018; lih. juga Tabel 1.1). Seperti yang disebutkan pada Bab 1 dalam volume ini, tampaknya jumlah kera yang dipelihara sebagai hewan peliharaan, di taman hiburan, dan sebagai hewan peraga untuk turis di seluruh wilayah kini meningkat, namun dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan estimasi yang akurat untuk masing-masing takson (lih. juga Bab 4, hal. 118–127).

Afrika

Kebun binatang menampung hanya sebagian kecil dari kera dalam kurungan di Afrika, yaitu 5% lebih sedikit. Jika digabungkan, data kebun binatang benua ini hanya mencakup 74 kera pada tahun 2018, yang terdiri dari 46 simpanse, 5 gorila, 22 owa, dan 1 orang utan (Species360, tanpa tahun). Seperti yang disebutkan di awal, data yang dilaporkan diperoleh pada tahun 2018, artinya beberapa angka mungkin mencerminkan periode pelaporan yang lebih awal. Pertimbangan lain adalah cakupan data. Basis data ini menyajikan sedikit saja lembaga dari Afrika, antara lain karena partisipasinya bersifat sukarela dan mewajibkan iuran, sehingga nilai yang dilaporkan kemungkinan besar lebih rendah dari yang sebenarnya.

Suaka dan pusat penyelamatan mewakili hampir 95% dari semua kera dalam kurungan yang dilaporkan di Afrika. Jumlah bonobo dan gorila di dalam suaka tidak jauh berbeda dari jumlah yang dilaporkan dalam *Negara Kera* volume sebelumnya, yaitu masing-masing sekitar 70 dan 118 ekor (Durham, 2018). Sebaliknya, jumlah simpanse yang diketahui di suaka di Afrika telah meningkat lebih dari 5% sejak volume sebelumnya (lih. Tabel 8.4). Peningkatan ini mencerminkan perubahan dalam pelaporan kepada sumber data seperti Species360 dan meningkatnya jumlah penyelamatan, translokasi, dan perubahan fasilitas, termasuk pada kasus-kasus sebagai berikut.

Di Pantai Gading, upaya penyelamatan satu simpanse soliter bernama Ponso men-

TABEL 8.4**Jumlah Simpanse di Suaka di Afrika, 2011, 2015, dan 2018**

Negara	Jumlah Suaka	2011	2015	2018
Kamerun	4	244	246	247
Republik Demokratik Kongo	6	85	109	117
Gabon	3	20	20	20
Gambia	1	77	106	101
Guinea	1	38	50	46
Pantai Gading	1	4	1	2
Kenya	1	44	39	39
Liberia	2	76	63	99
Nigeria	1	28	30	28
Republic Kongo	3	156	145	161
Sierra Leone	1	101	75	74
Africa Selatan	1	33	13	33
Uganda	1	45	49	49
Zambia	1	120	126	120
Total	27	1.071	1.072	1.136

Sumber data: Akatia (tanpa tahun); Chimfunshi (tanpa tahun); CSWCT (tanpa tahun); Durham (2018, tabel 8.6); Durham and Phillipson (2014, tabel 10.7); HELP Congo (tanpa tahun); J.A.C.K. (tanpa tahun); JGI South Africa (tanpa tahun); LCRP (tanpa tahun); OI Pejeta Conservancy (tanpa tahun); Projet Primates (tanpa tahun); SYCR (tanpa tahun); komunikasi pribadi dengan K. Conlee, 2018; J. Desmond, 2019; G. Le Flohic, 2018.

dorong perencanaan untuk suaka (Akatia, tanpa tahun). Lokasi suaka telah ditentukan, dan ketika proses formalitas lainnya sedang berjalan, pada saat itu Akatia juga merawat satu simpanse dan tiga primata lainnya (E. Raballand, komunikasi pribadi, 2020).

Lebih dari 60 simpanse diselamatkan saat suatu laboratorium penelitian diubah menjadi suaka di Liberia (Lange, 2017; K. Conlee, komunikasi pribadi, 2018). Oleh karena itu, suatu inisiatif baru dan unik yaitu Penyelamatan dan Perlindungan Simpanse Liberia (*Liberia Chimpanzee Rescue and Protection/LCRP*) didirikan untuk menampung anakan dan satwa lain yang membutuhkan perawatan, dari mana pun asalnya (LCRP, tanpa tahun; J. Desmond, komunikasi pribadi, 2019). Suaka LCRP kini menampung lebih dari 25 ekor satwa (J. Desmond, komunikasi pribadi, 2019).

Satu simpanse dari Irak dipindahkan ke Suaka Simpanse Sweetwaters di Kenya, dan

penyelamatan bayi simpanse lewat udara dari Taman Nasional Virunga ke Pusat Rehabilitasi Primata Lwiro di Republik Demokratik Kongo juga mendapatkan perhatian dari media internasional (Burilliard, 2018; Ohanesian, 2018).

Kesimpulan Data Statistik Terkini

Walaupun praktik pendaftaran dan pelaporan masih sangat bervariasi di seluruh dunia, data yang tersedia menyebutkan bahwa jumlah kera dalam kurungan di kebun binatang masih statis. Demografi populasi dalam kurungan di negara yang bukan habitat kera saat ini berubah, di mana laju pembiakan dan reproduksi secara keseluruhan lebih rendah, dan sebagai hasilnya, usia rata-rata dapat meningkat seiring dengan waktu.³

Baik di negara nonhabitat dan habitat, perubahan regulasi dapat menyebabkan peningka-

tan jumlah kera di suaka pada jangka pendek dan menengah. Kapasitas suaka bisa menjadi pertimbangan kritis bagi pihak pembuat dan penegak hukum dan bagi banyak pihak yang berkepentingan dalam kesejahteraan dan perlindungan kera. Kurangnya kapasitas suaka dapat memengaruhi operasi dan praktik fasilitas secara negatif, seperti dengan mendorong pelepasliaran kembali dan translokasi dalam kondisi di bawah optimal. Peningkatan luas maupun jumlah suaka sering kali diikuti oleh lonjakan satwa yang datang, sehingga hal ini menggarisbawahi bahwa kurangnya tempat bagi kera hasil sitaan dan kera yang dilepas secara sukarela merupakan penghalang besar bagi penegakan dan kepatuhan.

Dalam satu dekade terakhir ini terjadi peningkatan perhatian bagi hak-hak tiap individu kera, peningkatan pengetahuan ilmiah mengenai kebutuhan dan kemampuan kera, dan perubahan pandangan mengenai kehidupan kera. Faktor-faktor ini akan terus mendorong perubahan dalam standar kesejahteraan dan praktik perawatan kera dalam kurungan. Mereka juga dapat menyediakan konteks dan meningkatkan urgensi seputar permintaan akan kapasitas suaka dan pentingnya menurunkan pembunuhan dan penangkapan kera, serta perdagangan kera yang mendorong laju penampungan yang tidak berkelanjutan di pusat penyelamatan dan suaka di negara habitat kera.

Ucapan Terima Kasih

Penulis utama: Steven M. Wise, Esq.,⁴ Debra Durham⁵, dan Graham L. Banes⁶

Catatan Akhir

- 1 Bagian ini menggunakan istilah 'hewan nonmanusia' untuk menggarisbawahi bahwa manusia juga termasuk hewan sehingga menghindari anggapan bahwa hanya hewan nonmanusia yang disebut sebagai 'hewan'.
- 2 Namun demikian, dalam praktiknya, ada beberapa kelompok adat dan kaum minoritas yang selalu menolak hak-hak 'kepribadian' yang diberikan kepada semua manusia yang menjadi obyek perjanjian-perjanjian internasional ini.

- 3 Salah satu faktor pendorong utama demografi ini adalah perubahan moratorium AS untuk pembiakan di laboratorium, yang diikuti pergeseran besar menuju suaka, di mana sterilisasi dan bentuk kontrasepsi lainnya menjadi suatu norma. Selain itu, kebun binatang melakukan pembiakan yang lebih selektif, contohnya dengan fokus pada spesies paling terancam punah dan tidak mengikutsertakan satwa hibrida, seperti yang disebutkan dalam edisi *Negara Kera* sebelumnya (Durham, 2015, 2018).
- 4 Nonhuman Rights Project (www.nonhumanrights.org/).
- 5 D3 Theorem (<https://d3theorem.com/>).
- 6 Wisconsin National Primate Research Center (www.primate.wisc.edu/).